



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
21. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02);
23. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 20), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Standar Biaya Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022 adalah pedoman umum dan batasan biaya maksimal dalam penyusunan RKA-SKPD dan pelaksanaan anggaran SKPD yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun anggaran 2022.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengelola Keuangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-P SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perubahan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD-P.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan perubahan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Pejabat Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang melakukan pengelolaan barang yang terdiri dari Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna, Kuasa Pengguna, Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah.

## BAB II

### STANDAR BIAYA

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini diatur mengenai Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Satuan Biaya Honorarium;
  - b. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
  - c. Satuan Biaya Rapat Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor;
  - d. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
  - e. Satuan Biaya Pemeliharaan;
  - f. Satuan Biaya Jasa Peserta Kegiatan Non ASN;
  - g. Satuan Biaya Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan;
  - h. Satuan Biaya Jasa Tenaga Kesehatan.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 3

- (1) Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar harga satuan berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

### Pasal 4

Khusus ketentuan mengenai standar biaya dan tata cara perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri mengacu dan diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

### Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota Bengkulu ini mulai berlaku Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 25 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 11 Mei 2022

a.n. WALIKOTA BENGKULU  
WAKIL WALIKOTA  
Cap/dto  
DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 11 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU



NAYU ALDILA PUTRI, SH  
NIP. 197810102005022004

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR ...8..



LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN  
PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN  
ANGGARAN 2022

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN TERTINGGI  
DALAM PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan pada masing-masing daerah digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Walikota ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan Biaya Honorarium;
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor;
4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
5. Satuan Biaya Jasa Peserta Kegiatan Non ASN;
6. Satuan Biaya Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan Melalui Perjanjian/Perikatan;
7. Satuan Biaya Jasa Tenaga Kesehatan.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pegguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

- 1.1.3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 1.1.4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.6. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
  - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
    - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
    - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu
  - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
  - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut
    - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
    - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- f. besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dihitung berdasarkan total pagu belanja yang menjadi tanggungjawabnya diluar kegiatan rutin perangkat daerah seperti gaji, tunjangan, tunjangan penghasilan, kegiatan rutin air, listrik, internet dan telepon.

## 1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

### 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

## 1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

#### 1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

##### 1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
  - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

##### 1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

#### 1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

#### 1.4.4. Honorarium Pembaca Doa

Honorarium pembaca Doa diberikan kepada ASN/Non ASN yang diberikan tugas sebagai pembaca doa dan tidak termasuk diklat atau pelatihan.

#### 1.4.5. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

### 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

#### 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan maksimal jumlah tim yang dapat diberikan honorarium kepada setiap pejabat/pegawai :

| No. | JABATAN  | Batasan Jumlah Tim |
|-----|--|--------------------|
| 1   | Pejabat Eselon II                                    | 2                  |
| 2   | Pejabat Eselon III                                   | 3                  |
| 3   | Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional | 5                  |

- b. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- c. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
  2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- d. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- e. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi
- f. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

#### 1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

## 1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

### 1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

### 1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

### 1.6.3. Uang Jasa Pakar/Tenaga Ahli/Advokat

Uang jasa Pendampingan dan Bantuan Hukum Pemerintah Kota berasal Dari Unsur Pakar Hukum, Organisasi Bantuan Hukum /Advokat Dan Ahli Perancangan Peraturan Perundang-Undangan. Uang jasa diberikan kepada yang memberikan jasa/bantuan/pendampingan hukum, memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan tertulis. Uang Jasa dibayarkan per orang per bulan.

### 1.6.4. Honorarium Mediator

Honorarium mediator diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai mediator dalam penyelesaian kerugian daerah.

## 1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Walikota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi atau kota;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114 % (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi atau kota;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi, atau kota;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi atau kota; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi atau kota.

#### 1.8. Honorarium Rohaniawan

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

#### 1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

##### 1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur Sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

##### 1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

##### 1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.



Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Penyelenggaraan Kegiatan Sekolah

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian.

Honorarium penyelenggaraan kegiatan sekolah merupakan imbalan diberikan kepada guru PAUD Non PNS dan operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).

1.11. Honorarium Penulis Butir Soal

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
- c. penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- d. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

#### 1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

#### 1.14. Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah

Honorarium yang diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara yang bertugas melaksanakan pengurusan barang milik daerah.

#### 1.15. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Uang Lembur dan Uang Makan Lembur diberikan kepada ASN yang bekerja di luar dari jam kerja.

Dengan ketentuan :

- a. Pada hari Libur tariff uang lembur dihitung sebesar 200% (dua ratus persen) dari tariff lembur hari kerja
- b. Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut.
- c. Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1  
SATUAN BIAYA HONORARIUM

| No     | Uraian   | Satuan | Standar Biaya (Rp) |
|--------|--|--------|--------------------|
| (1)    | (2)  | (3)    | (4)                |
| 1.1    | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN   |        |                    |
| 1.1.1. | Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD/ Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) |        |                    |
|        | a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta   | OB     | 1.040.000          |
|        | b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta  | OB     | 1.250.000          |
|        | c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta  | OB     | 1.450.000          |
|        | d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar  | OB     | 1.660.000          |
|        | e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar  | OB     | 1.970.000          |
|        | f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar  | OB     | 2.280.000          |
|        | g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar   | OB     | 2.590.000          |
|        | h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar  | OB     | 3.010.000          |
|        | i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar  | OB     | 3.420.000          |
|        | j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar  | OB     | 3.840.000          |
|        | k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar   | OB     | 4.250.000          |
|        | l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar  | OB     | 4.770.000          |
|        | m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar  | OB     | 5.290.000          |
|        | n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar  | OB     | 5.810.000          |
|        | o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun   | OB     | 6.330.000          |
|        | p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun   | OB     | 7.370.000          |
| 1.1.2  | Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK)  |        |                    |
|        | a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta   | OB     | 1.010.000          |
|        | b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta  | OB     | 1.210.000          |
|        | c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta  | OB     | 1.410.000          |
|        | d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar  | OB     | 1.610.000          |
|        | e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar  | OB     | 1.910.000          |
|        | f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar  | OB     | 2.210.000          |
|        | g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar   | OB     | 2.520.000          |
|        | h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar  | OB     | 2.920.000          |

|  |       |   |    |           |
|--|-------|---|----|-----------|
|  |       | i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar                 | OB | 3.320.000 |
|  |       | j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar                 | OB | 3.720.000 |
|  |       | k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar                | OB | 4.130.000 |
|  |       | l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar               | OB | 4.630.000 |
|  |       | m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar               | OB | 5.130.000 |
|  |       | n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar               | OB | 5.640.000 |
|  |       | o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun                | OB | 6.140.000 |
|  |       | p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun                                  | OB | 7.140.000 |
|  |       |   |    |           |
|  | 1.1.3 | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  |    |           |
|  |       | a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta                                      | OB | 1.010.000 |
|  |       | b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta                   | OB | 1.210.000 |
|  |       | c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta                   | OB | 1.410.000 |
|  |       | d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar                   | OB | 1.610.000 |
|  |       | e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar                 | OB | 1.910.000 |
|  |       | f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar                 | OB | 2.210.000 |
|  |       | g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar                  | OB | 2.520.000 |
|  |       | h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar                 | OB | 2.920.000 |
|  |       | i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar                 | OB | 3.320.000 |
|  |       | j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar                 | OB | 3.720.000 |
|  |       | k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar                | OB | 4.130.000 |
|  |       | l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar               | OB | 4.630.000 |
|  |       | m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar               | OB | 5.130.000 |
|  |       | n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar               | OB | 5.640.000 |
|  |       | o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun                | OB | 6.140.000 |
|  |       | p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun                                  | OB | 7.140.000 |
|  |       |   |    |           |
|  | 1.1.4 | Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) |    |           |
|  |       | a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta                                      | OB | 400.000   |
|  |       | b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta                   | OB | 480.000   |
|  |       | c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta                   | OB | 570.000   |
|  |       | d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar                   | OB | 660.000   |
|  |       | e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar                 | OB | 770.000   |

|  |       |  |    |           |
|--|-------|--|----|-----------|
|  |       | f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar  | OB | 880.000   |
|  |       | g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar   | OB | 990.000   |
|  |       | h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar  | OB | 1.250.000 |
|  |       | i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar  | OB | 1.520.000 |
|  |       | j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar  | OB | 1.780.000 |
|  |       | k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar   | OB | 2.040.000 |
|  |       | l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar  | OB | 2.440.000 |
|  |       | m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar  | OB | 2.830.000 |
|  |       | n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar  | OB | 3.230.000 |
|  |       | o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun   | OB | 3.620.000 |
|  |       | p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun   | OB | 4.420.000 |
|  |       |  |    |           |
|  | 1.1.5 | Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan  |    |           |
|  |       | a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta   | OB | 340.000   |
|  |       | b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta  | OB | 420.000   |
|  |       | c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta  | OB | 500.000   |
|  |       | d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar  | OB | 570.000   |
|  |       | e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar  | OB | 670.000   |
|  |       | f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar  | OB | 770.000   |
|  |       | g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar   | OB | 860.000   |
|  |       | h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar  | OB | 1.090.000 |
|  |       | i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar  | OB | 1.320.000 |
|  |       | j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar  | OB | 1.550.000 |
|  |       | k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar   | OB | 1.780.000 |
|  |       | l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar  | OB | 2.120.000 |
|  |       | m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar  | OB | 2.470.000 |
|  |       | n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar  | OB | 2.810.000 |
|  |       | o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun   | OB | 3.160.000 |
|  |       | p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun   | OB | 3.840.000 |
|  | 1.1.6 | Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Penerimaan/Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan/Staf Pengelola Keuangan |    |           |
|  |       | a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta   | OB | 260.000   |
|  |       | b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta  | OB | 310.000   |

|     |                                  |   |    |           |
|-----|----------------------------------|---|----|-----------|
|     |                                  | c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta             | OB | 370.000   |
|     |                                  | d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar             | OB | 430.000   |
|     |                                  | e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar           | OB | 500.000   |
|     |                                  | f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar           | OB | 570.000   |
|     |                                  | g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar            | OB | 640.000   |
|     |                                  | h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar           | OB | 810.000   |
|     |                                  | i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar           | OB | 980.000   |
|     |                                  | j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar           | OB | 1.150.000 |
|     |                                  | k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar          | OB | 1.330.000 |
|     |                                  | l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar         | OB | 1.580.000 |
|     |                                  | m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar         | OB | 1.840.000 |
|     |                                  | n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar         | OB | 2.090.000 |
|     |                                  | o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun          | OB | 2.350.000 |
|     |                                  | p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun                            | OB | 2.860.000 |
| 1.2 | HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA |   |    |           |
|     | 1.2.1.                           | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa                          | OB | 680.000   |
|     | 1.2.2.                           | Honor Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa              |    |           |
|     | 1.2.2.1                          | Honor Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) |    |           |
|     |                                  | a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp 200 juta                           | OP | 680.000   |
|     |                                  | b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta        | OP | 850.000   |
|     |                                  | c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar        | OP | 1.020.000 |
|     |                                  | d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar      | OP | 1.270.000 |
|     |                                  | e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar      | OP | 1.520.000 |
|     |                                  | f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar       | OP | 1.780.000 |
|     |                                  | g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar      | OP | 2.120.000 |
|     |                                  | h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar      | OP | 2.450.000 |
|     |                                  | i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar      | OP | 2.790.000 |
|     |                                  | j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar     | OP | 3.130.000 |
|     |                                  | k. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar    | OP | 3.580.000 |
|     |                                  | l. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar    | OP | 4.030.000 |
|     |                                  | m. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar    | OP | 4.490.000 |
|     |                                  | n. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun     | OP | 4.940.000 |
|     |                                  | o. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 triliun                       | OP | 5.560.000 |

|         |  |    |           |
|---------|--|----|-----------|
| 1.2.2.2 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa Untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)               |    |           |
|         | a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp 200 juta  | OP | 760.000   |
|         | b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta   | OP | 760.000   |
|         | c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar   | OP | 920.000   |
|         | d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar   | OP | 1.140.000 |
|         | e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar   | OP | 1.370.000 |
|         | f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar  | OP | 1.600.000 |
|         | g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar   | OP | 1.910.000 |
|         | h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar   | OP | 2.210.000 |
|         | i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar   | OP | 2.520.000 |
|         | j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar  | OP | 2.820.000 |
|         | k. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar   | OP | 3.230.000 |
|         | l. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar   | OP | 3.640.000 |
|         | m. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar   | OP | 4.040.000 |
|         | n. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun  | OP | 4.450.000 |
|         | o. Nilai Pagu Pengadaan diatas 1 triliun   | OP | 5.010.000 |
| 1.2.2.3 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa Untuk Jasa Konsultansi /Jasa lainnya (Non Konstruksi) |    |           |
|         | a. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp 50 juta  | OP | 450.000   |
|         | b. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp 50 juta s.d Rp 100 juta                                       | OP | 450.000   |
|         | c. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp 100 juta   | OP | 450.000   |
|         | d. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta                         | OP | 480.000   |
|         | e. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta                         | OP | 600.000   |
|         | f. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar                         | OP | 720.000   |
|         | g. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar                       | OP | 910.000   |
|         | h. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar                       | OP | 1.090.000 |
|         | i. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar                        | OP | 1.270.000 |



|  |          |  |    |           |
|--|----------|--|----|-----------|
|  |          | j. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar   | OP | 1.510.000 |
|  |          | k. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar   | OP | 1.750.000 |
|  |          | l. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar   | OP | 1.990.000 |
|  |          | m. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar  | OP | 2.230.000 |
|  |          | n. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OP | 2.560.000 |
|  |          | o. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OP | 2.880.000 |
|  |          | p. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar | OP | 3.200.000 |
|  |          | q. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun  | OP | 3.520.000 |
|  |          | r. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 1 triliun                    | OP | 3.960.000 |
|  | 1.2.3.   | Honorarium Pengguna Anggaran   |    |           |
|  | 1.2.3.1. | Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)                              |    |           |
|  |          | a. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar                               | OP | 3.580.000 |
|  |          | b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar                               | OP | 4.030.000 |
|  |          | c. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar                               | OP | 4.490.000 |
|  |          | d. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Triliun                                | OP | 4.940.000 |
|  |          | e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun   | OP | 5.560.000 |
|  |          |  |    |           |
|  | 1.2.3.2  | Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)                               |    |           |
|  |          | a. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar                               | OP | 3.230.000 |
|  |          | b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar                               | OP | 3.640.000 |
|  |          | c. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar                               | OP | 4.040.000 |
|  |          | d. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Triliun                                | OP | 4.450.000 |
|  |          | e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun   | OP | 5.010.000 |
|  |          |  |    |           |
|  | 1.2.3.3  | Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)                                 |    |           |
|  |          | a. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 10 Miliar s.d. Rp 25 Miliar   | OP | 1.510.000 |
|  |          | b. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 25 Miliar s.d. Rp 50 Miliar   | OP | 1.750.000 |
|  |          | c. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 50 Miliar s.d. Rp 75 Miliar   | OP | 1.990.000 |

|      |  |  |    |           |
|------|--|--|----|-----------|
|      |  | d. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 75 Miliar s.d. Rp 100 Miliar  | OP | 2.230.000 |
|      |  | e. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 100 Miliar s.d. Rp 250 Miliar | OP | 2.560.000 |
|      |  | f. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 250 Miliar s.d. Rp 500 Miliar | OP | 2.880.000 |
|      |  | g. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 500 Miliar s.d. Rp 750 Miliar | OP | 3.200.000 |
|      |  | h. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 750 Miliar s.d. Rp 1 Triliun  | OP | 3.520.000 |
|      |  | i. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 1 Triliun                     | OP | 3.960.000 |
|      |  |  |    |           |
| 1.3. | HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)        |  |    |           |
|      | 1.3.1.   | Kepala   | OB | 1.000.000 |
|      | 1.3.2.   | Sekretaris/Staf Pendukung  | OB | 750.000   |
|      |  |  |    |           |
| 1.4. | HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA          |  |    |           |
|      | 1.4.1.   | Honorarium Narasumber/Pembahas   |    |           |
|      |  | a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya                                  | OJ | 1.700.000 |
|      |  | b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan     | OJ | 1.400.000 |
|      |  | c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan  | OJ | 1.200.000 |
|      |  | d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan   | OJ | 1.000.000 |
|      |  | e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan   | OJ | 900.000   |
|      | 1.4.2.   | Honorarium Moderator   | OK | 700.000   |
|      | 1.4.3.   | Honorarium Pembawa Acara   | OK | 400.000   |
|      | 1.4.4.   | Honorarium Pembaca Doa   | OK | 300.000   |
|      | 1.4.5.   | Honorarium Panitia   |    |           |
|      |  | a. Penanggung Jawab  | OK | 450.000   |
|      |  | b. Ketua/Wakil Ketua   | OK | 400.000   |
|      |  | c. Sekretaris  | OK | 300.000   |
|      |  | d. Anggota   | OK | 300.000   |
|      |  |  |    |           |
| 1.5  | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN |  |    |           |
|      | 1.5.1.   | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan  |    |           |
|      | 1.5.1.1  | Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah   |    |           |
|      |  | a. Pengarah  | OB | 1.500.000 |
|      |  | b. Penanggung Jawab  | OB | 1.250.000 |
|      |  | c. Ketua   | OB | 1.000.000 |
|      |  | d. Wakil Ketua   | OB | 850.000   |
|      |  | e. Sekretaris  | OB | 750.000   |
|      |  | f. Anggota   | OB | 750.000   |
|      | 1.5.1.2  | Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah   |    |           |
|      |  | a. Pengarah  | OB | 750.000   |

|      |  |  |             |           |         |
|------|--|--|-------------|-----------|---------|
|      |  | b. Penanggung Jawab  | OB          | 700.000   |         |
|      |  | c. Ketua   | OB          | 650.000   |         |
|      |  | d. Wakil Ketua   | OB          | 600.000   |         |
|      |  | e. Sekretaris  | OB          | 500.000   |         |
|      |  | f. Anggota   | OB          | 500.000   |         |
|      |  |  |             |           |         |
|      | 1.5.2.   | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                  |             |           |         |
|      | 1.5.2.1  | Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah/<br>Sekretaris Daerah       |             |           |         |
|      |  | a. Ketua/Wakil Ketua   | OB          | 250.000   |         |
|      |  | b. Anggota   | OB          | 220.000   |         |
|      |  |  |             |           |         |
| 1.6. | HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA                                       |  |             |           |         |
|      | 1.6.1.   | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli                  | OK          | 1.800.000 |         |
|      | 1.6.2.   | Honorarium Beracara  | OK          | 1.800.000 |         |
|      | 1.6.3.   | Uang Jasa  |             |           |         |
|      |  | a. Pakar /Tenaga Ahli  | OB          | 5.000.000 |         |
|      |  | b. Advokat/Pengacara   | OB          | 5.000.000 |         |
|      |  | c. Tenaga Ahli Fraksi  | OB          | 3.500.000 |         |
|      | 1.6.4.   | Honorarium Mediator  | OK          | 250.000   |         |
|      |  |  |             |           |         |
| 1.7. | HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL   |  |             |           |         |
|      | 1.7.1.   | SLTA   | OB          | 2.100.000 |         |
|      | 1.7.2.   | DI/DII/DIII/Sarjana Terapan                                    | OB          | 2.400.000 |         |
|      | 1.7.3.   | Sarjana (S1)   | OB          | 2.600.000 |         |
|      | 1.7.4.   | Master (S2)  | OB          | 2.800.000 |         |
|      | 1.7.5.   | Doktor (S3)  | OB          | 3.000.000 |         |
|      |  |  |             |           |         |
| 1.8. | HONORARIUM ROHANIAWAN  |  |             | OK        | 400.000 |
|      |  |  |             |           |         |
| 1.9. | HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE |  |             |           |         |
|      | 1.9.1  | Honorarium Tim Penyusun Jurnal                                 |             |           |         |
|      |  | a. Penanggung Jawab  | Oter        | 500.000   |         |
|      |  | b. Redaktur  | Oter        | 400.000   |         |
|      |  | c. Penyunting/Editor   | Oter        | 300.000   |         |
|      |  | d. Desain Grafis   | Oter        | 180.000   |         |
|      |  | e. Fotografer  | Oter        | 180.000   |         |
|      |  | f. Sekretariat   | Oter        | 150.000   |         |
|      |  | g. Pembuat Artikel   | Per Halaman | 200.000   |         |
|      | 1.9.2.   | Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah                        |             |           |         |
|      |  | a. Penanggung Jawab  | Oter        | 400.000   |         |
|      |  | b. Redaktur  | Oter        | 300.000   |         |
|      |  | c. Penyunting/Editor   | Oter        | 250.000   |         |
|      |  | d. Desain Grafis   | Oter        | 180.000   |         |
|      |  | e. Fotografer  | Oter        | 180.000   |         |
|      |  | f. Sekretariat   | Oter        | 150.000   |         |
|      |  | g. Pembuat Artikel   | Per Halaman | 100.000   |         |
|      | 1.9.3.   | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website |             |           |         |
|      |  | a. Penanggung Jawab  | OB          | 500.000   |         |
|      |  | b. Redaktur  | OB          | 450.000   |         |

|       |   |   |                       |           |
|-------|---|---|-----------------------|-----------|
|       |   | c. Editor   | OB                    | 400.000   |
|       |   | d. Web Admin  | OB                    | 350.000   |
|       |   | e. Web Developer  | OB                    | 300.000   |
|       |   | f. Pembuat Artikel  | Per Halaman           | 100.000   |
|       |   |   |                       |           |
| 1.10  | HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN PENYELENGGARAN KEGIATAN SEKOLAH    |   |                       |           |
|       | 1.10.1  | Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar                                 |                       |           |
|       |   | a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian  | Naskah/<br>Pelajaran  | 150.000   |
|       |   | b. Pengawas Ujian   | OH                    | 240.000   |
|       |   | c. Pemeriksa Hasil Ujian  | Siswa/Ma-<br>ta Ujian | 5.000     |
|       | 1.10.2  | Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah                              |                       |           |
|       |   | a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian  | Naskah/<br>Pelajaran  | 190.000   |
|       |   | b. Pengawas Ujian   | OH                    | 270.000   |
|       |   | c. Pemeriksa Hasil Ujian  | Siswa/Ma-<br>ta Ujian | 7.500     |
|       | 1.10.3  | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Sekolah   |                       |           |
|       |   | a. Guru PAUD Non PNS  | OB                    | 380.000   |
|       |   | b. Operator DAPODIK PAUD Negeri   | OB                    | 125.000   |
|       |   | c. Operator DAPODIK SD Negeri   | OB                    | 125.000   |
|       |   | d. Operator DAPODIK SMP Negeri  | OB                    | 125.000   |
|       |   | e. Operator Administrasi DAPODIK  | OB                    | 125.000   |
|       |   |   |                       |           |
| 1.11  | HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KOTA                          |   |                       |           |
|       | 1.11.1.   | Honorarium Penyusun Butir Soal  | Perbutir<br>Soal      | 45.000    |
|       | 1.11.2.   | Honorarium Telaah Butir Soal  | Perbutir<br>Soal      | 20.000    |
| 1.12. | HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) |   |                       |           |
|       | 1.12.1.   | Honorarium Penceramah   | OJP                   | 1.000.000 |
|       | 1.12.2.   | Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara  | OJP                   | 300.000   |
|       | 1.12.3  | Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara | OJP                   | 200.000   |
|       | 1.12.4  | Honorarium Penyusun Modul Diklat  | Per Modul             | 5.000.000 |
|       | 1.12.5.   | Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat  |                       |           |
|       |   | a. Lama Diklat s.d. 5 hari :  |                       |           |
|       |   | 1) Penanggung Jawab   | OK                    | 450.000   |
|       |   | 2) Ketua/Wakil Ketua  | OK                    | 400.000   |
|       |   | 3) Sekretaris   | OK                    | 300.000   |
|       |   | 4) Anggota  | OK                    | 300.000   |
|       |   | b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :   |                       |           |
|       |   | 1) Penanggung Jawab   | OK                    | 675.000   |
|       |   | 2) Ketua/Wakil Ketua  | OK                    | 600.000   |
|       |   | 3) Sekretaris   | OK                    | 450.000   |
|       |   | 4) Anggota  | OK                    | 450.000   |
|       |   | c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :   |                       |           |
|       |   | 1) Penanggung Jawab   | OK                    | 900.000   |
|       |   | 2) Ketua/Wakil Ketua  | OK                    | 800.000   |
|       |   | 3) Sekretaris   | OK                    | 600.000   |

|      |  |   |    |           |
|------|--|---|----|-----------|
|      |  | 4) Anggota  | OK | 600.000   |
| 1.13 | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH        |   |    |           |
|      | 1.13.1.  | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah             |    |           |
|      |  | a. Pembina  | OB | 3.500.000 |
|      |  | b. Pengarah   | OB | 3.000.000 |
|      |  | c. Ketua  | OB | 2.500.000 |
|      |  | d. Wakil Ketua  | OB | 2.000.000 |
|      |  | e. Sekretaris   | OB | 1.500.000 |
|      |  | f. Anggota  | OB | 1.300.000 |
|      | 1.13.2.  | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah |    |           |
|      |  | a. Ketua  | OB | 1.000.000 |
|      |  | b. Sekretaris   | OB | 900.000   |
|      |  | c. Anggota  | OB | 600.000   |
| 1.14 | HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH |   |    |           |
|      | 1.14.1   | Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah              |    |           |
|      |  | a. Pemegang Kekuasaan Pengelola BMD                   | OB | 1.500.000 |
|      |  | b. Pengelola Barang Milik Daerah                      | OB | 1.250.000 |
|      |  | c. Pejabat Penatausahaan Barang BMD                   | OB | 1.100.000 |
|      |  | d. Pengurus Barang Pengelola BMD                      | OB | 850.000   |
|      |  | e. Pembantu Pengurus Barang Pengelola BMD             | OB | 750.000   |
|      | 1.14.2   | Honorarium Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barag    |    |           |
|      |  | a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang              |    |           |
|      |  | Neraca asset > 100 Milyar                             | OB | 1.200.000 |
|      |  | Neraca asset ≤ 100 Milyar                             | OB | 1.000.000 |
|      |  | b. Pejabat Penatausahaan Barang                       |    |           |
|      |  | Neraca asset > 100 Milyar                             | OB | 1.100.000 |
|      |  | Neraca asset ≤ 100 Milyar                             | OB | 850.000   |
|      |  | c. Pengurus Barang Pengguna                           |    |           |
|      |  | Neraca asset > 100 Milyar                             | OB | 1.000.000 |
|      |  | Neraca asset ≤ 100 Milyar                             | OB | 750.000   |
|      |  | d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna                  | OB | 500.000   |
|      |  | e. Pengurus Barang Pembantu                           | OB | 350.000   |
| 1.15 | Uang Lembur dan Uang Makan Lembur                |   |    |           |
|      | 1.15.1   | Uang Lembur   |    |           |
|      |  | a. Golongan IV  | OJ | 25.000    |
|      |  | b. Golongan III                                       | OJ | 20.000    |
|      |  | c. Golongan II  | OJ | 17.000    |
|      |  | d. Golongan I   | OJ | 13.000    |
|      |  | e. Non PNS  | OJ | 20.000    |
|      | 1.15.2   | Uang Makan Lembur                                     |    |           |
|      |  | a. Golongan IV  | OJ | 41.000    |
|      |  | b. Golongan III                                       | OJ | 37.000    |
|      |  | c. Golongan II/Golongan I                             | OJ | 35.000    |
|      |  | d. Non PNS  | OJ | 31.000    |

## 2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain;

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas

Ketentuan Lampiran I Peraturan Walikota ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian;
2. uang representasi; dan
3. biaya penginapan

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan diluar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2 dan Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi terinci pada Tabel 1.3.

TABEL 1.2  
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO. | PROVINSI         | SATUAN | LUAR KOTA  | DALAM KOTA<br>LEBIH DARI 8<br>(DELAPAN) JAM | DIKLAT     |
|-----|------------------|--------|------------|---|------------|
| (1) | (2)              | (3)    | (4)        | (5)   | (6)        |
| 1   | Aceh             | OH     | Rp 360.000 | Rp 140.000                                  | Rp 110.000 |
| 2   | Sumatera Utara   | OH     | Rp 370.000 | Rp 150.000                                  | Rp 110.000 |
| 3   | Riau             | OH     | Rp 370.000 | Rp 150.000                                  | Rp 110.000 |
| 4   | Kepulauan Riau   | OH     | Rp 370.000 | Rp 150.000                                  | Rp 110.000 |
| 5   | Jambi            | OH     | Rp 370.000 | Rp 150.000                                  | Rp 110.000 |
| 6   | Sumatera Barat   | OH     | Rp 380.000 | Rp 150.000                                  | Rp 110.000 |
| 7   | Sumatera Selatan | OH     | Rp 380.000 | Rp 150.000                                  | Rp 110.000 |
| 8   | Lampung          | OH     | Rp 380.000 | Rp 150.000                                  | Rp 110.000 |
| 9   | Bengkulu         | OH     | Rp 380.000 | Rp 150.000                                  | Rp 110.000 |
| 10  | Bangka Belitung  | OH     | Rp 410.000 | Rp 160.000                                  | Rp 120.000 |
| 11  | Banten           | OH     | Rp 370.000 | Rp 150.000                                  | Rp 110.000 |
| 12  | Jawa Barat       | OH     | Rp 430.000 | Rp 170.000                                  | Rp 130.000 |
| 13  | DKI Jakarta      | OH     | Rp 530.000 | Rp 210.000                                  | Rp 160.000 |

|    |                     |    |            |            |            |
|----|---------------------|----|------------|------------|------------|
| 14 | Jawa Tengah         | OH | Rp 370.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000 |
| 15 | DI Yogyakarta       | OH | Rp 420.000 | Rp 170.000 | Rp 130.000 |
| 16 | Jawa Timur          | OH | Rp 410.000 | Rp 160.000 | Rp 120.000 |
| 17 | Bali                | OH | Rp 480.000 | Rp 190.000 | Rp 140.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | OH | Rp 440.000 | Rp 180.000 | Rp 130.000 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | OH | Rp 430.000 | Rp 170.000 | Rp 130.000 |
| 20 | Kalimantan Barat    | OH | Rp 380.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000 |
| 21 | Kalimantan Tengah   | OH | Rp 360.000 | Rp 140.000 | Rp 110.000 |
| 22 | Kalimantan Selatan  | OH | Rp 380.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000 |
| 23 | Kalimantan Timur    | OH | Rp 430.000 | Rp 170.000 | Rp 130.000 |
| 24 | Kalimantan Utara    | OH | Rp 430.000 | Rp 170.000 | Rp 130.000 |
| 25 | Sulawesi Utara      | OH | Rp 370.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000 |
| 26 | Gorontalo           | OH | Rp 370.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000 |
| 27 | Sulawesi Barat      | OH | Rp 410.000 | Rp 160.000 | Rp 120.000 |
| 28 | Sulawesi Selatan    | OH | Rp 430.000 | Rp 170.000 | Rp 130.000 |
| 29 | Sulawesi Tengah     | OH | Rp 370.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000 |
| 30 | Sulawesi Tenggara   | OH | Rp 380.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000 |
| 31 | Maluku              | OH | Rp 380.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000 |
| 32 | Maluku Utara        | OH | Rp 430.000 | Rp 170.000 | Rp 130.000 |
| 33 | Papua               | OH | Rp 580.000 | Rp 230.000 | Rp 170.000 |
| 34 | Papua Barat         | OH | Rp 480.000 | Rp 190.000 | Rp 140.000 |

TABEL 1.3  
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI

| No  | Kabupaten/Kota        | Satuan | Standar biaya (Rp) | KET              |
|-----|-----------------------|--------|--------------------|------------------|
| (1) | (2)                   | (3)    | (4)                | (5)              |
| 1   | Kota Bengkulu         | OH     | 150.000            | Lebih dari 8 jam |
| 2   | Kab. Kaur             | OH     | 380.000            |                  |
| 3   | Kab. Bengkulu Selatan | OH     | 380.000            |                  |
| 4   | Kab. Seluma           | OH     | 380.000            |                  |
| 5   | Kab. Bengkulu Tengah  | OH     | 380.000            |                  |
| 6   | Kab. Kepahiang        | OH     | 380.000            |                  |
| 7   | Kab. Rejang Lebong    | OH     | 380.000            |                  |
| 8   | Kab. Lebong           | OH     | 380.000            |                  |
| 9   | Kab. Bengkulu Utara   | OH     | 380.000            |                  |
| 10  | Kab. Mukomuko         | OH     | 380.000            |                  |



2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.4

Tabel 1.4

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

| NO  | URAIAN                            | SATUAN | LUAR KOTA  | DALAM KOTA<br>LEBIH DARI 8<br>(DELAPAN) JAM |
|-----|-----------------------------------|--------|------------|---|
| (1) | (2)                               | (3)    | (4)        | (5)   |
| 1   | Pejabat Negara,<br>Pejabat Daerah | OH     | Rp 250.000 | Rp 125.000                                  |
| 2   | Pejabat Eselon II                 | OH     | Rp 150.000 | Rp 75.000                                   |

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.5

TABEL 1.5  
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| No | Provinsi            | Satuan | Tarif Hotel (Rp)                                       |   |   |   | Golongan I/II (Rp) |
|----|---------------------|--------|--|---|---|---|--------------------|
|    |                     |        | Kepala Daerah/<br>Ketua DPRD/<br>Pejabat Eselon I (Rp) | Anggota DPRD/<br>Pejabat Eselon II (Rp) | Pejabat Eselon III/<br>Golongan IV (Rp) | Pejabat Eselon IV/<br>Golongan III (Rp) |                    |
| 1  | 2                   | 3      | 4  | 5                                       | 6                                       | 7                                       | 8                  |
| 1  | Aceh                | OH     | 4,420,000  | 3,526,000                               | 1,294,000                               | 556,000                                 | 556,000            |
| 2  | Sumatera Utara      | OH     | 4,960,000  | 1,518,000                               | 1,100,000                               | 530,000                                 | 530,000            |
| 3  | Riau                | OH     | 3,820,000  | 3,119,000                               | 1,650,000                               | 852,000                                 | 852,000            |
| 4  | Kepulauan Riau      | OH     | 4,275,000  | 1,854,000                               | 1,037,000                               | 792,000                                 | 792,000            |
| 5  | Jambi               | OH     | 4,000,000  | 3,337,000                               | 1,212,000                               | 580,000                                 | 580,000            |
| 6  | Sumatera Barat      | OH     | 5,236,000  | 3,332,000                               | 1,353,000                               | 650,000                                 | 650,000            |
| 7  | Sumatera Selatan    | OH     | 5,850,000  | 3,083,000                               | 1,571,000                               | 861,000                                 | 861,000            |
| 8  | Lampung             | OH     | 4,491,000  | 2,067,000                               | 1,140,000                               | 580,000                                 | 580,000            |
| 9  | Bengkulu            | OH     | 2,071,000  | 1.628,000                               | 1,546,000                               | 630,000                                 | 630,000            |
| 10 | Bangka Belitung     | OH     | 3,827,000  | 2,838,000                               | 1,957,000                               | 622,000                                 | 622,000            |
| 11 | Banten              | OH     | 5,725,000  | 2,373,000                               | 1,000,000                               | 718,000                                 | 718,000            |
| 12 | Jawa Barat          | OH     | 5,381,000  | 2,755,000                               | 1,006,000                               | 570,000                                 | 570,000            |
| 13 | DKI Jakarta         | OH     | 5,850,000  | 1.490.000                               | 992,000                                 | 730.000                                 | 730.000            |
| 14 | Jawa Tengah         | OH     | 4,242,000  | 1,480,000                               | 954,000                                 | 600,000                                 | 600,000            |
| 15 | DI Yogyakarta       | OH     | 5,017,000  | 2,695,000                               | 1,384,000                               | 845,000                                 | 845,000            |
| 16 | Jawa Timur          | OH     | 4,400,000  | 1,605,000                               | 1,076,000                               | 664,000                                 | 664,000            |
| 17 | Bali                | OH     | 4,890,000  | 1,946,000                               | 990,000                                 | 910,000                                 | 910,000            |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | OH     | 3,500,000  | 2,648,000                               | 1,418,000                               | 580,000                                 | 580,000            |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | OH     | 3,000,000  | 1,493,000                               | 1,355,000                               | 550,000                                 | 550,000            |
| 20 | Kalimantan Barat    | OH     | 2,654,000  | 1,538,000                               | 1,125,000                               | 538,000                                 | 538,000            |
| 21 | Kalimantan Tengah   | OH     | 4,901,000  | 3,391,000                               | 1,160,000                               | 659,000                                 | 659,000            |
| 22 | Kalimantan Selatan  | OH     | 4,797,000  | 3,316,000                               | 1,500,000                               | 540,000                                 | 540,000            |
| 23 | Kalimantan Timur    | OH     | 4,000,000  | 2,188,000                               | 1,507,000                               | 804,000                                 | 804,000            |
| 24 | Kalimantan Utara    | OH     | 4,000,000  | 2,188,000                               | 1,507,000                               | 804,000                                 | 804,000            |
| 25 | Sulawesi Utara      | OH     | 4,919,000  | 2,290,000                               | 924,000                                 | 782,000                                 | 782,000            |
| 26 | Gorontalo           | OH     | 4,168,000  | 2,549,000                               | 1,431,000                               | 764,000                                 | 764,000            |
| 27 | Sulawesi Barat      | OH     | 4,076,000  | 2,581,000                               | 1,075,000                               | 704,000                                 | 704,000            |
| 28 | Sulawesi Selatan    | OH     | 4,820,000  | 1,550,000                               | 1,020,000                               | 732.000                                 | 732.000            |
| 29 | Sulawesi Tengah     | OH     | 2,309,000  | 2,027,000                               | 1,567,000                               | 951,000                                 | 951,000            |
| 30 | Sulawesi Tenggara   | OH     | 2,475,000  | 2,059,000                               | 1,297,000                               | 786,000                                 | 786,000            |
| 31 | Maluku              | OH     | 3,467,000  | 3,240,000                               | 1,048,000                               | 667,000                                 | 667,000            |
| 32 | Maluku Utara        | OH     | 3,440,000  | 3,175,000                               | 1,073,000                               | 600.000                                 | 600.000            |
| 33 | Papua               | OH     | 3,859,000  | 3,318,000                               | 2,521,000                               | 829,000                                 | 829,000            |
| 34 | Papua Barat         | OH     | 3,872,000  | 3,212,000                               | 2,056,000                               | 718.000                                 | 718.000            |

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam provinsi. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi terinci pada Tabel 1.6

TABEL 1.6  
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI

| No | Kabupaten/Kota             | Satuan | Tarif Hotel (Rp)  |  |  |  |                       |
|----|----------------------------|--------|---|--|--|--|-----------------------|
|    |                            |        | Kepala Daerah/<br>Ketua DPRD/<br>Pejabat Eselon I<br>(Rp) | Anggota DPRD/<br>Pejabat Eselon II<br>(Rp) | Pejabat Eselon III/<br>Golongan IV<br>(Rp) | Pejabat Eselon IV/<br>Golongan III<br>(Rp) | Golongan I/II<br>(Rp) |
| 1  | 2                          | 3      | 4   | 5  | 6  | 7  | 8                     |
| 1  | Kabupaten Kaur             | OH     | 520,000   | 500,000                                    | 400,000                                    | 300,000                                    | 250,000               |
| 2  | Kabupaten Bengkulu Selatan | OH     | 520,000   | 500,000                                    | 400,000                                    | 300,000                                    | 250,000               |
| 3  | Kabupaten Seluma           | OH     | 520,000   | 500,000                                    | 400,000                                    | 300,000                                    | 250,000               |
| 4  | Kabupaten Bengkulu Tengah  | OH     | 520,000   | 500,000                                    | 400,000                                    | 300,000                                    | 250,000               |
| 5  | Kabupaten Kepahiang        | OH     | 520,000   | 500,000                                    | 400,000                                    | 300,000                                    | 250,000               |
| 6  | Kabupaten Rejang Lebong    | OH     | 520,000   | 500,000                                    | 400,000                                    | 300,000                                    | 250,000               |
| 7  | Kabupaten Lebong           | OH     | 520,000   | 500,000                                    | 400,000                                    | 300,000                                    | 250,000               |
| 8  | Kabupaten Bengkulu Utara   | OH     | 520,000   | 500,000                                    | 400,000                                    | 300,000                                    | 250,000               |
| 9  | Kabupaten Mukomuko         | OH     | 520,000   | 500,000                                    | 400,000                                    | 300,000                                    | 250,000               |

### 3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

#### 3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
  - a) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
  - b) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;
2. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.7 dan Tabel 1.8.

Tabel 1.7  
Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertermuan Di Luar Kantor  
Setingkat Kepala Daerah

| NO | URAIAN           | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|----|------------------|--------|--------------|
| 1  | <i>Halfday</i>   | OP     | 250.000      |
| 2  | <i>Fullday</i>   | OP     | 373.000      |
| 3  | <i>Fullboard</i> | OP     | 973.000      |
| 4  | <i>Residence</i> | OP     | 623.000      |

TABEL 1.8  
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN  
DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

| NO | URAIAN           | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|----|------------------|--------|--------------|
| 1  | <i>Halfday</i>   | OP     | 214.000      |
| 2  | <i>Fullday</i>   | OP     | 284.000      |
| 3  | <i>Fullboard</i> | OP     | 912.000      |
| 4  | <i>Residence</i> | OP     | 498.000      |

### 3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1. 9

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.9  
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN  
DI LUAR KANTOR

| NO | URAIAN                               | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|----|--------------------------------------|--------|--------------|
| 1  | <i>Fullboard</i> Luar Daerah         | OH     | 130.000      |
| 2  | <i>Fullboard</i> Dalam Daerah        | OP     | 130.000      |
| 3  | <i>Fullday/ Halfday</i> Dalam Daerah | OP     | 95.000       |
| 4  | <i>Residence</i> Dalam Daerah        | OP     | 130.000      |

#### 4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus beserta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas terinci pada tabel 1.10

TABEL 1.10  
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

| NO | URAIAN  | SATUAN | BESARAN (Rp)  |
|----|---|--------|---------------|
| 1  | Kendaraan Dinas Kepala Daerah/Eselon I                        | Unit   | 702.970.000   |
| 2  | Kendaraan Dinas Eselon II                                     | Unit   | 482.961.000   |
| 3  | Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) |        |               |
|    | a. Pick Up  | Unit   | 259.112.500   |
|    | b. Minibus  | Unit   | 320.255.000   |
|    | c. Double Gardan  | Unit   | 472.230.000   |
| 4  | Kendaraan Operasional Bus                                     |        |               |
|    | a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil                                  | Unit   | 360.942.000   |
|    | b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang                                 | Unit   | 718.252.000   |
|    | c. Roda 8 dan/atau Bus Besar                                  | Unit   | 1.184.787.000 |
| 5  | Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)   |        |               |
|    | a. Operasional  | Unit   | 31.688.000    |
|    | b. Lapangan   | Unit   | 38.146.000    |

#### 5. SATUAN BIAYA JASA PESERTA KEGIATAN NON ASN

Uang Transport yang diberikan oleh penyelenggara/Panitia kegiatan kepada peserta Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion*/ Bimtek atau kegiatan sejenis, Standar satuan biaya transport diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.11

TABEL 1.11  
SATUAN BIAYA JASA PESERTA KEGIATAN NON ASN

| NO  | URAIAN   | SATUAN | STANDAR BIAYA (RP) |
|-----|--|--------|--------------------|
| (1) | (2)  | (3)    | (4)                |
| 1   | Jasa Peserta Kegiatan Non ASN (Uang Transport) | OK     | 150.000            |

Pemberian uang transport lokal hanya diberikan kepada Non ASN sebagai peserta Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion*/Bimtek atau kegiatan sejenis.

6. SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN KANTOR/LAPANGAN MELALUI PERJANJIAN/PERIKATAN

Satuan biaya jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan dapat diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut :

6.1. Jasa petugas penunjang kegiatan kantor melalui perjanjian/perikatan.

Jasa petugas penunjang kegiatan kantor melalui perjanjian/perikatan dapat diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a) dalam rangka menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- b) memiliki ijazah pendidikan, sertifikat dan/atau keahlian yang dipersyaratkan;
- c) memiliki perikatan berupa perjanjian kerja;
- d) Perjanjian kerja ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan Pegawai non ASN/tidak tetap bersangkutan, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak melampaui tahun anggaran berkenaan.
- e) memiliki nomenklatur jabatan dan rincian tugas; dan
- f) bersedia ditempatkan sampai ke unit kerja terendah berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Standar satuan biaya jasa petugas penunjang kegiatan kantor melalui perjanjian kerja/perikatan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.12

Tabel 1.12  
SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN KANTOR  
MELALUI PERJANJIAN KERJA/PERIKATAN

| NO  | URAIAN   | SATUAN | STANDAR BIAYA (RP) |
|-----|--|--------|--------------------|
| (1) | (2)  | (3)    | (4)                |
| 1   | Pegawai Honorer /Tidak Tetap   | OB     | 1.500.000,-        |
| 2   | Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai :  |        |                    |
|     | a. Staf Walikota/Wakil Walikota  | OB     | 2.500.000,-        |
|     | b. Staf Sekretaris Daerah, Staf Para Asisten   | OB     | 2.250.000,-        |
|     | c. Ajudan Istri Walikota   |        |                    |
|     | d. Supir Sekretaris Daerah dan para Asisten, Supir Ibu Walikota dan Wakil Walikota, Supir Ketua Dharma Wanita Kota                       | OB     | 2.250.000,-        |
|     | e. Kepala Rumah Tangga Balai Kota dan Kepala Rumah Tangga Rumah Dinas Wakil Walikota,  |        |                    |
|     | f. Staf Rumah Dinas Walikota/Wakil Walikota serta Staf pada Staf Ahli Walikota di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.           |        |                    |
| 3   | Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai ;  |        |                    |
|     | 1. Tenaga Programmer   | OB     | 2.500.000,-        |
|     | 2. Tenaga Ahli IT  | OB     | 3.500.000,-        |
|     | 3. Penulis berita, photograper, Kameramen, disain grafis, tenaga monitoring media dan medsos, editing vidio/photo, penyiar dan reporter. | OB     | 2.500.000,-        |
|     | 4. Tenaga Dokter/Dokter Gigi   | OB     | 2.500.000,-        |



Tabel 1.13

SATUAN BIAYA JASA AJUDAN, PATROLI PENGAWAL YANG DIPERBANTUKAN DARI PEGAWAI HONORER, TNI/POLRI/ASN, SUPIR DAN SATPOL PP YANG DITUGASKAN PADA WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PEMIMPIN DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH.

| NO  | URAIAN   | SATUAN | STANDAR BIAYA (RP) |
|-----|--|--------|--------------------|
| (1) | (2)  | (3)    | (4)                |
| 1   | Ajudan yang berasal dari TNI/Polri/ASN                     |        |                    |
|     | a. Walikota  | OB     | 5.000.000,-        |
|     | b. Wakil Walikota  | OB     | 4.500.000,-        |
|     | c. Pimpinan DPRD   | OB     | 5.000.000,-        |
|     | d. Sekretaris Daerah                                       | OB     | 4.000.000,-        |
| 2   | Ajudan yang diperbantukan dari Pegawai Honorar/Tidak tetap |        |                    |
|     | a. Walikota  | OB     | 5.000.000,-        |
|     | b. Wakil Walikota  | OB     | 4.500.000,-        |
|     | c. Pimpinan DPRD   | OB     | 5.000.000,-        |
|     | d. Sekretaris Daerah                                       | OB     | 4.000.000,-        |
| 3   | Patroli Pengawal   |        |                    |
|     | a. Patwal yang diperbantukan dari TNI/Polri                | OB     | 3.000.000,-        |
|     | b. Patwal yang diperbantukan dari Satpol PP                | OB     | 2.500.000,-        |
| 4   | Supir Walikota/Wakil Walikota                              | OB     | 2.500.000,-        |

6.2. Jasa petugas penunjang kegiatan lapangan melalui perjanjian/perikatan.

Jasa petugas penunjang kegiatan lapangan melalui perjanjian/perikatan diberikan kepada pekerja/tenaga lapangan yang bekerja untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan, berdasarkan keputusan/Perintah dari Pejabat berwenang.

Jasa yang diberikan kepada pekerja/tenaga lapangan terdiri atas :

1. Petugas/tenaga lapangan/bantuan pengamanan bagi ASN/Non ASN pada Dinas Perhubungan yang dikarenakan tugasnya melaksanakan tugas pengamanan menjadi Petugas Pos Komando (Posko) dalam rangka Perayaan Hari Besar dengan melakukan piket/tugas jaga diluar jam kerja/waktu normal.
2. Petugas/tenaga lapangan pada dinas Sosial yang diberi tugas membantu tim verifikasi dan validasi data kemiskinan, petugas operator verifikasi dan validasi.
3. Petugas lapangan pendistribusian SPPT PBB yang diperuntukkan bagi perangkat kelurahan dan perangkat RT yang dilibatkan dalam menunjang kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.
4. Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan yang diberikan kepada Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan yang bertugas melaksanakan pengurusan vaksinasi hewan.
5. Penari pada kegiatan di Dinas Pariwisata yang diberi tugas membantu Dinas Pariwisata dalam Acara dan Kegiatan kepariwisataan.
6. Petugas/Pengurus yang diberikan tugas sebagai Petugas/Pengurus rumah ibadah (Imam, Khatib, Bilal, Gharim, Rubiyah, Guru ngaji, Da'i dan Mubaligh)
7. Ketua RT/Ketua RW /Ketua Adat/Linmas yang diberikan tugas membantu kelurahan dalam melaksanakan administrasi pemerintahan tingkat RT dan RW dan kegiatan adat serta Petugas pengamanan di Lngkungan Masyarakat.
8. Petugas yang ditunjuk sebagai Instruktur Senam pada perangkat daerah.

Standar satuan biaya jasa petugas penunjang kegiatan lapangan melalui perjanjian kerja/perikatan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.14

TABEL 1.14  
SATUAN JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN LAPANGAN MELALUI  
PERJANJIAN KERJA/PERIKATAN

| NO  | URAIAN   | SATUAN | STANDAR BIAYA (RP) |
|-----|--|--------|--------------------|
| (1) | (2)  | (3)    | (4)                |
| 1   | Petugas Posko Perayaan Hari Besar (Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru)  | OH     | 150.000,-          |
| 2   | Petugas/Operator verifikasi dan validasi data kemiskinan   | OH     | 150.000,-          |
| 3   | Petugas pendistribusian SPPT PBB   |        |                    |
|     | a. Perangkat Kelurahan   | Lembar | 1.000,-            |
|     | b. Perangkat RT  | Lembar | 2.500,-            |
| 4   | Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan yang diberikan kepada Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan yang bertugas melaksanakan pengurusan Vaksinasi hewan:   |        |                    |
|     | a. Petugas vaksinasi rabies  | Dosis  | 12.500,-           |
|     | b. Petugas vaksinasi jembrana dan Septicaemia Epizootika   | Dosis  | 15.000,-           |
|     | c. Transpor Petugas Kontro populasi, Tim URC penyakit Hewan Menuar Strategis (PHMS), Tim Penerbitan Pemotongan Hewan Ternak Produktif, Tim Pemeriksa Antemortem dan Post Mortem Hewan Qurban, Tim Sidak dan Pengawasan daging di Pasar-Pasar | OH     | 150.000,-          |
| 5   | Tim Penari   | OH     | 325.000,-          |
|     | Petugas/Pengurus rumah ibadah  |        |                    |
|     | a. Imam  | OH     | 300.000,-          |
|     | b. Khatib, Bilal, Gharim, Rubi dan Rubiyah   | OH     | 150.000,-          |
|     | c. Guru ngaji; dan   | OH     | 500.000,-          |
|     | d. Da'i/Mubaligh   | OH     | 300.000,-          |
| 6   | Ketua RT/Ketua RW /Ketua Adat/Linmas   |        |                    |
|     | a. Ketua RT/Ketua RW/Ketua Adat  | OB     | 600.000,-          |
|     | b. Linmas  | OB     | 300.000,-          |
| 7   | Instruktur Senam   | OK     | 350.000,-          |

7. SATUAN BIAYA JASA TENAGA KESEHATAN.

Biaya jasa tenaga kesehatan diberikan khusus kepada tenaga kesehatan penanganan covid yang terdiri atas tim penanganan covid-19, petugas piket posko, petugas penyemprotan disinfektan, tim pemulasaran jenazah, petugas pelaksana vaksinasi.

Standar satuan biaya jasa tenaga kesehatan diberikan khusus kepada tenaga kesehatan penanganan covid-19 diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.15 dan 1.16

Tabel 1.15

Satuan Biaya Jasa Tenaga Kesehatan Tim Penanganan Covid-19 pada Rumah Sakit Harapan dan Doa

| No  | Uraian                      | Satuan | Standar biaya (Rp) |
|-----|-----------------------------|--------|--------------------|
| (1) | (2)                         | (3)    | (4)                |
| 1   | Dokter Spesialis            | OH     | 300.000,-          |
| 2   | Dokter Umum/Dokter Gigi     | OH     | 150.000,-          |
| 3   | Perawat/Bidan               | OH     | 125.000,-          |
| 4   | PenataRadiologi             | OH     | 100.000,-          |
| 5   | Tenaga Laboratorium         | OH     | 100.000,-          |
| 6   | Apoteker                    | OH     | 100.000,-          |
| 7   | Ass Apoteker/Tenaga Farmasi | OH     | 50.000,-           |
| 8   | Tenaga Gizi                 | OH     | 50.000,-           |
| 9   | Sopir                       | OH     | 50.000,-           |
| 10  | Kurir                       | OH     | 50.000,-           |
| 11  | Laundry                     | OH     | 50.000,-           |
| 12  | Teknisi                     | OH     | 50.000,-           |
| 13  | Cleaning Servis             | OH     | 25.000,-           |
| 14  | Security                    | OH     | 25.000,-           |
| 15  | Pemulasaran Jenazah         | OH     | 150.000,-          |
| 16  | Satuan Tugas                | OH     | 50.000,-           |

Tabel 1.16

Standar Biaya Jasa Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19

| No  | Uraian   | Satuan | Standar biaya (Rp) |
|-----|--|--------|--------------------|
| (1) | (2)  | (3)    | (4)                |
| 1   | Transport Petugas                                |        |                    |
|     | a. Piket Posko                                   | OH     | 300.000,-          |
|     | b. Penyemprotan Disinfektan                      | OH     | 100.000,-          |
| 2   | Petugas Tim Pemulasaran Jenazah                  | OK     | 3.000.000,-        |
| 3   | a. Insentif petugas pelaksana vaksinasi          | OB     | 1.500.000,-        |
|     | b. Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 |        |                    |
|     | - Dokter   | OB     | 3.000.000,-        |
|     | - Bidan/Perawat/Analis                           | OB     | 2.000.000,-        |
|     | - Tenaga Kesehatan Lainnya                       | OB     | 1.200.000,-        |

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

a.n. WALIKOTA BENGKULU,

WAKIL WALIKOTA

Cap/dto

DEDY WAHYUDI

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN  
PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN  
ANGGARAN 2022

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI  
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban terdiri atas:

1. Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara Profesional;
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Satuan Biaya Konsumsi Rapat; dan
4. Satuan Biaya Pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan /atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1  
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU  
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

| NO. | URAIAN                   | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|--------------------------|--------|--------------|
| 1.1 | Honorarium Narasumber    | OJ     | 1.700.000    |
| 1.2 | Honorarium Moderator     | OK     | 1.000.000    |
| 1.3 | Honorarium Pembawa Acara | OK     | 750.000      |

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

## 2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

### 2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara ke berangkat ke suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2  
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

| NO  | KOTA    |                | SATUAN BIAYA TIKET |                 |
|-----|---------|----------------|--------------------|-----------------|
|     | ASAL    | TUJUAN         | BISNIS             | EKONOMI         |
| (1) | (2)     | (3)            | (4)                | (5)             |
| 1.  | JAKARTA | AMBON          | Rp13.285.000,00    | Rp7.081.000,00  |
| 2.  | JAKARTA | BALIKPAPAN     | Rp7.412.000,00     | Rp3.797.000,00  |
| 3.  | JAKARTA | BANDA ACEH     | Rp7.519.000,00     | Rp4.492.000,00  |
| 4.  | JAKARTA | BANDAR LAMPUNG | Rp2.407.000,00     | Rp1.583.000,00  |
| 5.  | JAKARTA | BANJARMASIN    | Rp5.252.000,00     | Rp2.995.000,00  |
| 6.  | JAKARTA | BATAM          | Rp4.867.000,00     | Rp2.888.000,00  |
| 7.  | JAKARTA | BENGGULU       | Rp4.364.000,00     | Rp2.621.000,00  |
| 8.  | JAKARTA | BIAK           | Rp14.065.000,00    | Rp7.519.000,00  |
| 9.  | JAKARTA | DENPASAR       | Rp5.305.000,00     | Rp3.262.000,00  |
| 10. | JAKARTA | GORONTALO      | Rp7.231.000,00     | Rp4.824.000,00  |
| 11. | JAKARTA | JAMBI          | Rp4.065.000,00     | Rp2.460.000,00  |
| 12. | JAKARTA | JAYAPURA       | Rp14.568.000,00    | Rp8.193.000,00  |
| 13. | JAKARTA | YOGYAKARTA     | Rp4.107.000,00     | Rp2.268.000,00  |
| 14. | JAKARTA | KENDARI        | Rp7.658.000,00     | Rp4.182.000,00  |
| 15. | JAKARTA | KUPANG         | Rp9.413.000,00     | Rp5.081.000,00  |
| 16. | JAKARTA | MAKASSAR       | Rp7.444.000,00     | Rp3.829.000,00  |
| 17. | JAKARTA | MALANG         | Rp4.599.000,00     | Rp2.695.000,00  |
| 18. | JAKARTA | MAMUJU         | Rp7.295.000,00     | Rp4.867.000,00  |
| 19. | JAKARTA | MANADO         | Rp10.824.000,00    | Rp5.102.000,00  |
| 20. | JAKARTA | MANOKWARI      | Rp16.226.000,00    | Rp10.824.000,00 |
| 21. | JAKARTA | MATARAM        | Rp5.316.000,00     | Rp3.230.000,00  |
| 22. | JAKARTA | MEDAN          | Rp7.252.000,00     | Rp3.808.000,00  |
| 23. | JAKARTA | PADANG         | Rp5.530.000,00     | Rp2.952.000,00  |
| 24. | JAKARTA | PALANGKARAYA   | Rp4.984.000,00     | Rp2.984.000,00  |
| 25. | JAKARTA | PALEMBANG      | Rp3.861.000,00     | Rp2.268.000,00  |
| 26. | JAKARTA | PALU           | Rp9.348.000,00     | Rp5.113.000,00  |

|     |                |                |                 |                 |
|-----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27  | JAKARTA        | PANGKAL PINANG | Rp3.412.000,00  | Rp2.139.000,00  |
| 28. | JAKARTA        | PEKANBARU      | Rp5.583.000,00  | Rp3.016.000,00  |
| 29. | JAKARTA        | PONTIANAK      | Rp4.353.000,00  | Rp2.781.000,00  |
| 30. | JAKARTA        | SEMARANG       | Rp3.861.000,00  | Rp2.182.000,00  |
| 31. | JAKARTA        | SOLO           | Rp3.861.000,00  | Rp2.342.000,00  |
| 32. | JAKARTA        | SURABAYA       | Rp5.466.000,00  | Rp2.674.000,00  |
| 33. | JAKARTA        | TERNATE        | Rp10.001.000,00 | Rp6.664.000,00  |
| 34  | JAKARTA        | TIMIKA         | Rp13.830.000,00 | Rp7.487.000,00  |
| 35. | AMBON          | DENPASAR       | Rp8.054.000,00  | Rp4.471.000,00  |
| 36. | AMBON          | JAYAPURA       | Rp7.434.000,00  | Rp4.161.000,00  |
| 37. | AMBON          | KENDARI        | Rp4.824.000,00  | Rp2.856.000,00  |
| 38. | AMBON          | MAKASSAR       | Rp6.022.000,00  | Rp3.455.000,00  |
| 39. | AMBON          | MANOKWARI      | Rp5.177.000,00  | Rp3.027.000,00  |
| 40. | AMBON          | PALU           | Rp6.140.000,00  | Rp3.508.000,00  |
| 41. | AMBON          | SORONG         | Rp3.637.000,00  | Rp2.257.000,00  |
| 42. | AMBON          | SURABAYA       | Rp8.803.000,00  | Rp4.845.000,00  |
| 43. | AMBON          | TERNATE        | Rp4.022.000,00  | Rp2.449.000,00  |
| 44. | BALIKPAPAN     | BANDA ACEH     | Rp12.739.000,00 | Rp6.749.000,00  |
| 45. | BALIKPAPAN     | BATAM          | Rp10.354.000,00 | Rp5.305.000,00  |
| 46. | BALIKPAPAN     | DENPASAR       | Rp10.739.000,00 | Rp5.648.000,00  |
| 47. | BALIKPAPAN     | JAYAPURA       | Rp19.071.000,00 | Rp10.086.000,00 |
| 48. | BALIKPAPAN     | YOGYAKARTA     | Rp9.669.000,00  | Rp4.749.000,00  |
| 49. | BALIKPAPAN     | MAKASSAR       | Rp12.664.000,00 | Rp6.150.000,00  |
| 50. | BALIKPAPAN     | MANADO         | Rp15.702.000,00 | Rp7.295.000,00  |
| 51. | BALIKPAPAN     | MEDAN          | Rp12.493.000,00 | Rp6.140.000,00  |
| 52. | BALIKPAPAN     | PADANG         | Rp10.942.000,00 | Rp5.369.000,00  |
| 53. | BALIKPAPAN     | PALEMBANG      | Rp9.445.000,00  | Rp4.749.000,00  |
| 54. | BALIKPAPAN     | PEKAN BARU     | Rp10.996.000,00 | Rp5.423.000,00  |
| 55. | BALIKPAPAN     | SEMARANG       | Rp9.445.000,00  | Rp4.674.000,00  |
| 56. | BALIKPAPAN     | SOLO           | Rp9.445.000,00  | Rp4.813.000,00  |
| 57. | BALIKPAPAN     | SURABAYA       | Rp10.889.000,00 | Rp5.113.000,00  |
| 58. | BALIKPAPAN     | TIMIKA         | Rp18.408.000,00 | Rp9.445.000,00  |
| 59. | BANDA ACEH     | DENPASAR       | Rp10.835.000,00 | Rp6.279.000,00  |
| 60. | BANDA ACEH     | JAYAPURA       | Rp19.167.000,00 | Rp10.717.000,00 |
| 61. | BANDA ACEH     | YOGYAKARTA     | Rp9.765.000,00  | Rp5.380.000,00  |
| 62. | BANDA ACEH     | MAKASAR        | Rp12.760.000,00 | Rp6.781.000,00  |
| 63. | BANDA ACEH     | MANADO         | Rp15.798.000,00 | Rp7.926.000,00  |
| 64  | BANDA ACEH     | PONTIANAK      | Rp9.990.000,00  | Rp5.840.000,00  |
| 65. | BANDA ACEH     | SEMARANG       | Rp9.530.000,00  | Rp5.305.000,00  |
| 66. | BANDA ACEH     | SOLO           | Rp9.530.000,00  | Rp5.444.000,00  |
| 67. | BANDA ACEH     | SURABAYA       | Rp10.985.000,00 | Rp5.744.000,00  |
| 68. | BANDA ACEH     | TIMIKA         | Rp18.504.000,00 | Rp10.076.000,00 |
| 69. | BANDAR LAMPUNG | BALIKPAPAN     | Rp8.129.000,00  | Rp4.129.000,00  |
| 70. | BANDAR LAMPUNG | BANDA ACEH     | Rp8.225.000,00  | Rp4.760.000,00  |
| 71. | BANDAR LAMPUNG | BANJARMASIN    | Rp6.193.000,00  | Rp3.412.000,00  |



|      |                |                   |                  |                 |
|------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 72.  | BANDAR LAMPUNG | BATAM             | Rp5.840.000,00   | Rp3.316.000,00  |
| 73.  | BANDAR LAMPUNG | BIAK              | Rp14.1 19.000,00 | Rp7.487.000,00  |
| 74.  | BANDAR LAMPUNG | DENPASAR          | Rp6.236.000,00   | Rp3.647.000,00  |
| 75.  | BANDAR LAMPUNG | JAYAPURA          | Rp14.568.000,00  | Rp8.097.000,00  |
| 76.  | BANDAR LAMPUNG | YOGYAKARTA        | Rp5.155.000,00   | Rp2.760.000,00  |
| 77.  | BANDAR LAMPUNG | KENDARI           | Rp8.354.000,00   | Rp4.482.000,00  |
| 78.  | BANDAR LAMPUNG | MAKASAR           | Rp8.161.000,00   | Rp4.161.000,00  |
| 79.  | BANDAR LAMPUNG | MALANG            | Rp5.594.000,00   | Rp3.134.000,00  |
| 80.  | BANDAR LAMPUNG | MANADO            | Rp11.199.000,00  | Rp5.305.000,00  |
| 81.  | BANDAR LAMPUNG | MATARAM           | Rp6.246.000,00   | Rp3.626.000,00  |
| 82.  | BANDAR LAMPUNG | MEDAN             | Rp7.979.000,00   | Rp4.150.000,00  |
| 83.  | BANDAR LAMPUNG | PADANG            | Rp6.439.000,00   | Rp3.380.000,00  |
| 84.  | BANDAR LAMPUNG | PALANGKARAYA      | Rp5.947.000,00   | Rp3.401.000,00  |
| 85.  | BANDAR LAMPUNG | PALEMBANG         | Rp4.931.000,00   | Rp2.760.000,00  |
| 86.  | BANDAR LAMPUNG | PEKANBARU         | Rp6.a82.000,00   | Rp3.433.000,00  |
| 87.  | BANDAR LAMPUNG | PONTIANAK         | Rp5.380.000,00   | Rp3.220.000,00  |
| 88.  | BANDAR LAMPUNG | SEMARANG          | Rp4.931.000,00   | Rp2.685.000,00  |
| 89.  | BANDAR LAMPUNG | SOLO              | Rp4.931.000,00   | Rp2.824.000,00  |
| 90.  | BANDAR LAMPUNG | SURABAYA          | Rp6.386.000,00   | Rp3.123.000,00  |
| 91.  | BANDAR LAMPUNG | TIMIKA            | Rp13.905.000,00  | Rp7.455.000,00  |
| 92.  | BANDUNG        | BATAM             | Rp6.289.000,00   | Rp3.583.000,00  |
| 93.  | BANDUNG        | DENPASAR          | Rp5.626.000,00   | Rp3.252.000,00  |
| 94.  | BANDUNG        | JAKARTA           | Rp2.064.000,00   | Rp1.476.000,00  |
| 95.  | BANDUNG        | JAMBI             | Rp5.006.000,00   | Rp2.941.000,00  |
| 96.  | BANDUNG        | YOGYAKARTA        | Rp3.369.000,00   | Rp2.129.000,00  |
| 97.  | BANDUNG        | PADANG            | Rp6.129.000,00   | Rp3.508.000,00  |
| 98.  | BANDUNG        | PALEMBANG         | Rp4.385.000,00   | Rp2.631.000,00  |
| 99.  | BANDUNG        | PANGKAL<br>PINANG | Rp4.599.000,00   | Rp2.738.000,00  |
| 100. | BANDUNG        | PEKANBARU         | Rp6.525.000,00   | Rp3.701.000,00  |
| 101. | BANDUNG        | SEMARANG          | Rp3.027.000,00   | Rp 1.957.000,00 |
| 102. | BANDUNG        | SOLO              | Rp3.647.000,00   | Rp2.268.000,00  |
| 103. | BANDUNG        | SURABAYA          | Rp4.824.000,00   | Rp2.856.000,00  |
| 104. | BANDUNG        | TANJUNG<br>PANDAN | Rp4.439.000,00   | Rp2.663.000,00  |
| 105. | BANJARMASIN    | BANDA ACEH        | Rp10.792.000,00  | Rp6.022.000,00  |
| 106. | BANJARMASIN    | BATAM             | Rp8.407.000,00   | Rp4.578.000,00  |
| 107. | BANJARMASIN    | BIAK              | Rp16.686.000,00  | Rp8.749.000,00  |
| 108. | BANJARMASIN    | DENPASAR          | Rp8.792.000,00   | Rp4.920.000,00  |
| 109. | BANJARMASIN    | JAYAPURA          | Rp17.135.000,00  | Rp9.359.000,00  |
| 110. | BANJARMASIN    | YOGYAKARTA        | Rp7.723.000,00   | Rp4.022.000,00  |
| 111. | BANJARMASIN    | MEDAN             | Rp10.546.000,00  | Rp5.412.000,00  |
| 102. | BANJARMASIN    | PADANG            | Rp9.006.000,00   | Rp4.642.000,00  |
| 103. | BANJARMASIN    | PALEMBANG         | Rp7.498.000,00   | Rp4.022.000,00  |
| 104. | BANJARMASIN    | PEKANBARU         | Rp9.049.000,00   | Rp4.696.000,00  |
| 105. | BANJARMASIN    | SEMARANG          | Rp7.498.000,00   | Rp3.958.000,00  |

|      |             |              |                 |                 |
|------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 106. | BANJARMASIN | SOLO         | Rp7.498.000,00  | Rp4.097.000,00  |
| 107. | BANJARMASIN | SURABAYA     | Rp8.942.000,00  | Rp4.385.000,00  |
| 108. | BANJARMASIN | TIMIKA       | Rp16.472.000,00 | Rp8.717.000,00  |
| 109. | BATAM       | BANDA ACEH   | Rp10.439.000,00 | Rp5.936.000,00  |
| 120. | BATAM       | DENPASAR     | Rp8.450.000,00  | Rp4.824.000,00  |
| 121. | BATAM       | JAYAPURA     | Rp16.782.000,00 | Rp9.263.000,00  |
| 122. | BATAM       | YOGYAKARTA   | Rp7.370.000,00  | Rp3.936.000,00  |
| 123. | BATAM       | MAKASSAR     | Rp10.375.000,00 | Rp5.337.000,00  |
| 124. | BATAM       | MANADO       | Rp13.413.000,00 | Rp6.482.000,00  |
| 125. | BATAM       | MEDAN        | Rp10.193.000,00 | Rp5.316.000,00  |
| 126. | BATAM       | PADANG       | Rp8.653.000,00  | Rp4.546.000,00  |
| 127. | BATAM       | PALEMBANG    | Rp7.145.000,00  | Rp3.936.000,00  |
| 128. | BATAM       | PEKANBARU    | Rp8.707.000,00  | Rp4.599.000,00  |
| 129. | BATAM       | PONTIANAK    | Rp7.594.000,00  | Rp4.396.000,00  |
| 130. | BATAM       | SEMARANG     | Rp7.145.000,00  | Rp3.861.000,00  |
| 131. | BATAM       | SOLO         | Rp7.145.000,00  | Rp4.000.000,00  |
| 132. | BATAM       | SURABAYA     | Rp8.600.000,00  | Rp4.300.000,00  |
| 133. | BATAM       | TIMIKA       | Rp16.119.000,00 | Rp8.621.000,00  |
| 134. | BENGKULU    | PALEMBANG    | Rp2.899.000,00  | Rp 1.893.000,00 |
| 135. | BIAK        | BALIKPAPAN   | Rp18.622.000,00 | Rp9.477.000,00  |
| 136. | BIAK        | BANDA ACEH   | Rp18.718.000,00 | Rp10.108.000,00 |
| 137. | BIAK        | BATAM        | Rp16.333.000,00 | Rp8.664.000,00  |
| 138. | BIAK        | DENPASAR     | Rp16.729.000,00 | Rp8.995.000,00  |
| 139. | BIAK        | JAYAPURA     | Rp3.615.000,00  | Rp2.321.000,00  |
| 140. | BIAK        | YOGYAKARTA   | Rp15.648.000,00 | Rp8.108.000,00  |
| 141. | BIAK        | MANADO       | Rp11.734.000,00 | Rp6.353.000,00  |
| 142. | BIAK        | MEDAN        | Rp18.472.000,00 | Rp9.498.000,00  |
| 143. | BIAK        | PADANG       | Rp16.932.000,00 | Rp8.728.000,00  |
| 144. | BIAK        | PALEMBANG    | Rp15.424.000,00 | Rp8.108.000,00  |
| 145. | BIAK        | PEKANBARU    | Rp16.985.000,00 | Rp8.781.000,00  |
| 146. | BIAK        | PONTIANAK    | Rp15.873.000,00 | Rp8.568.000,00  |
| 147. | BIAK        | SURABAYA     | Rp12.782.000,00 | Rp7.081.000,00  |
| 148. | BIAK        | TIMIKA       | Rp5.808.000,00  | Rp3.444.000,00  |
| 149. | DENPASAR    | JAYAPURA     | Rp11.680.000,00 | Rp6.845.000,00  |
| 150. | DENPASAR    | KUPANG       | Rp5.091.000,00  | Rp2.952.000,00  |
| 151. | DENPASAR    | MAKASSAR     | Rp4.182.000,00  | Rp2.631.000,00  |
| 152. | DENPASAR    | MANADO       | Rp7,851.000,00  | Rp4.278.000,00  |
| 153. | DENPASAR    | MATARAM      | Rp1.840.000,00  | Rp 1.390.000,00 |
| 154. | DENPASAR    | MEDAN        | Rp10.589.000,00 | Rp5.658.000,00  |
| 155. | DENPASAR    | PADANG       | Rp9.049.000,00  | Rp4.888.000,00  |
| 156. | DENPASAR    | PALANGKARAYA | Rp8.557.000,00  | Rp4.909.000,00  |
| 157. | DENPASAR    | PALEMBANG    | Rp7.541.000,00  | Rp4.278.000,00  |
| 158. | DENPASAR    | PEKANBARU    | Rp9.092.000,00  | Rp4.942.000,00  |
| 159. | DENPASAR    | PONTIANAK    | Rp7.990.000,00  | Rp4.738.000,00  |
| 160. | DENPASAR    | TIMIKA       | Rp10.140.000,00 | Rp6.129.000,00  |
| 161. | JAMBI       | BALIKPAPAN   | Rp7.733.000,00  | Rp4.407.000,00  |

|      |            |              |                 |                 |
|------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 162. | JAMBI      | BANJARMASIN  | Rp7.690.000,00  | Rp4.193.000,00  |
| 163. | JAMBI      | DENPASAR     | Rp7.733.000,00  | Rp4.439.000,00  |
| 164. | JAMBI      | YOGYAKARTA   | Rp6.653.000,00  | Rp3.551.000,00  |
| 165. | JAMBI      | KUPANG       | Rp11.434.000,00 | Rp6.075.000,00  |
| 166. | JAMBI      | MAKASSAR     | Rp9.659.000,00  | Rp4.952.000,00  |
| 167. | JAMBI      | MALANG       | Rp7.091.000,00  | Rp3.925.000,00  |
| 168. | JAMBI      | MANADO       | Rp12.707.000,00 | Rp6.097.000,00  |
| 169. | JAMBI      | PALANGKARAYA | Rp7.444.000,00  | Rp4.193.000,00  |
| 170. | JAMBI      | PONTIANAK    | Rp6.878.000,00  | Rp4.011.000,00  |
| 171. | JAMBI      | SEMARANG     | Rp6.428.000,00  | Rp3.476.000,00  |
| 172. | JAMBI      | SOLO         | Rp6.428.000,00  | Rp3.615.000,00  |
| 173. | JAMBI      | SURABAYA     | Rp7.883.000,00  | Rp3.915.000,00  |
| 174. | JAYAPURA   | YOGYAKARTA   | Rp13.274.000,00 | Rp7.690.000,00  |
| 175. | JAYAPURA   | MANADO       | Rp22.109.000,00 | Rp11.263.000,00 |
| 176. | JAYAPURA   | MEDAN        | Rp18.932.000,00 | Rp10.097.000,00 |
| 177. | JAYAPURA   | PADANG       | Rp17.381.000,00 | Rp9,327.000,00  |
| 178. | JAYAPURA   | PALEMBANG    | Rp15.873.000,00 | Rp8.717.000,00  |
| 179. | JAYAPURA   | PEKANBARU    | Rp17.435.000,00 | Rp9.380.000,00  |
| 180. | JAYAPURA   | PONTIANAK    | Rp16.322.000,00 | Rp9.177.000,00  |
| 181. | JAYAPURA   | TIMIKA       | Rp3.615.000,00  | Rp2.289.000,00  |
| 182. | YOGYAKARTA | DENPASAR     | Rp3.861.000,00  | Rp2.481.000,00  |
| 183. | YOGYAKARTA | MAKASSAR     | Rp6.525.000,00  | Rp3.893.000,00  |
| 184. | YOGYAKARTA | MANADO       | Rp10.536.000,00 | Rp5.722.000,00  |
| 185. | YOGYAKARTA | MEDAN        | Rp9.519.000,00  | Rp4.770.000,00  |
| 186. | YOGYAKARTA | PADANG       | Rp7.969.000,00  | Rp4.000.000,00  |
| 187. | YOGYAKARTA | PALEMBANG    | Rp6.460.000,00  | Rp3.380.000,00  |
| 188. | YOGYAKARTA | PEKANBARU    | Rp8.022.000,00  | Rp.4.054.000,00 |
| 189. | YOGYAKARTA | PONTIANAK    | Rp6.910.000,00  | Rp3.840.000,00  |
| 190. | YOGYAKARTA | TIMIKA       | Rp11.894.000,00 | Rp7.038.000,00  |
| 191. | KENDARI    | BANDA ACEH   | Rp12.953.000,00 | Rp7.102.000,00  |
| 192. | KENDARI    | BATAM        | Rp10.568.000,00 | Rp5.658.000,00  |
| 193. | KENDARI    | DENPASAR     | Rp5.455.000,00  | Rp3.273.000,00  |
| 194. | KENDARI    | YOGYAKARTA   | Rp8.129.000,00  | Rp4.706.000,00  |
| 195. | KENDARI    | PADANG       | Rp11.167.000,00 | Rp5.722.000,00  |
| 196. | KENDARI    | PALEMBANG    | Rp9.659.000,00  | Rp5.102.000,00  |
| 197. | KENDARI    | PEKANBARU    | Rp11.220.000,00 | Rp5.776.000,00  |
| 198. | KENDARI    | SEMARANG     | Rp9.659.000,00  | Rp5.027.000,00  |
| 199. | KENDARI    | SOLO         | Rp9.659.000,00  | Rp5.166.000,00  |
| 200. | KENDARI    | SURABAYA     | Rp11.103.000,00 | Rp5.466.000,00  |
| 201. | KENDARI    | TIMIKA       | Rp18.633.000,00 | Rp9.798.000,00  |
| 202. | KUPANG     | JAYAPURA     | Rp14.386.000,00 | Rp8.108.000,00  |
| 203. | KUPANG     | YOGYAKARTA   | Rp7.348.000,00  | Rp4.182.000,00  |
| 204. | KUPANG     | MAKASSAR     | Rp7.637.000,00  | Rp4.311.000,00  |
| 205. | KUPANG     | MANADO       | Rp11.648.000,00 | Rp6.140.000,00  |
| 206. | KUPANG     | SURABAYA     | Rp6.749.000,00  | Rp3.722.000,00  |
| 207. | MAKASSAR   | BIAK         | Rp8.493.000,00  | Rp4.931.000,00  |

|      |          |              |                 |                 |
|------|----------|--------------|-----------------|-----------------|
| 208. | MAKASSAR | JAYAPURA     | Rp10.193.000,00 | Rp5.787.000,00  |
| 209. | MAKASSAR | KENDARI      | Rp2.663.000,00  | Rp 1.786.000,00 |
| 210. | MAKASSAR | MANADO       | Rp5.327.000,00  | Rp2.909.000,00  |
| 211. | MAKASSAR | TIMIKA       | Rp11.723.000,00 | Rp6.567.000,00  |
| 212. | MALANG   | BALIKPAPAN   | Rp10.108.000,00 | Rp5.134.000,00  |
| 213. | MALANG   | BANDA ACBH   | Rp10.204.000,00 | Rp5.765.000,00  |
| 214. | MALANG   | BANJARMASIN  | Rp8.161.000,00  | Rp4.407.000,00  |
| 215. | MALANG   | BATAM        | Rp7.819.000,00  | Rp4.31 1.000,00 |
| 216. | MALANG   | BIAK         | Rp16.087.000,00 | Rp8.482.000,00  |
| 217. | MALANG   | JAYAPURA     | Rp16.536.000,00 | Rp9.092.000,00  |
| 218. | MALANG   | KENDARI      | Rp10.322.000,00 | Rp5.487.000,00  |
| 219. | MALANG   | MAKASSAR     | Rp10.129.000,00 | Rp5.166.000,00  |
| 220. | MALANG   | MANADO       | Rp13.167.000,00 | Rp6.311.000,00  |
| 221. | MALANG   | MEDAN        | Rp9.958.000,00  | Rp5.145.000,00  |
| 222. | MALANG   | PADANG       | Rp8.418.000,00  | Rp4.385.000,00  |
| 223. | MALANG   | PALANGKARAYA | Rp7.915.000,00  | Rp4.407.000,00  |
| 224. | MALANG   | PALEMBANG    | Rp6.899.000,00  | Rp3.765.000,00  |
| 225. | MALANG   | PEKANBARU    | Rp8.461.000,00  | Rp4.439.000,00  |
| 226. | MALANG   | TIMIKA       | Rp15.873.000,00 | Rp8.461.000,00  |
| 227. | MANADO   | MEDAN        | Rp15.552.000,00 | Rp7.316.000,00  |
| 228. | MANADO   | PADANG       | Rp14.012.000,00 | Rp6.546.000,00  |
| 229. | MANADO   | PALEMBANG    | Rp12.504.000,00 | Rp5.926.000,00  |
| 230. | MANADO   | PEKANBARU    | Rp14.055.000,00 | Rp6.599.000,00  |
| 231. | MANADO   | PONTIANAK    | Rp12.953.000,00 | Rp6.396.000,00  |
| 232. | MANADO   | SEMARANG     | Rp12.504.000,00 | Rp5.851.000,00  |
| 233. | MANADO   | SOLO         | Rp12.504.000,00 | Rp5.990.000,00  |
| 234. | MANADO   | SURABAYA     | Rp9.937.000,00  | Rp5.262.000,00  |
| 235. | MANADO   | TIMIKA       | Rp16.183.000,00 | Rp8.995.000,00  |
| 236. | MATARAM  | BALIKPAPAN   | Rp10.750.000,00 | Rp5.615.000,00  |
| 237. | MATARAM  | BANDA ACEH   | Rp10.846.000,00 | Rp6.246.000,00  |
| 238. | MATARAM  | BANJARMASIN  | Rp8.803.000,00  | Rp4.888.000,00  |
| 239. | MATARAM  | BATAM        | Rp8.461.000,00  | Rpa.803.000,00  |
| 240. | MATARAM  | BIAK         | Rp11.552.000,00 | Rp6.546.000,00  |
| 241. | MATARAM  | JAYAPURA     | Rp13.092.000,00 | Rp7.327.000,00  |
| 242. | MATARAM  | YOGYAKARTA   | Rp4.417.000,00  | Rp2.781.000,00  |
| 243. | MATARAM  | MAKASSAR     | Rp4.717.000,00  | Rp2.909.000,00  |
| 244. | MATARAM  | MANADO       | Rp8.717.000,00  | Rp4.738.000,00  |
| 245. | MATARAM  | MEDAN        | Rp10.600.000,00 | Rp5.637.000,00  |
| 246. | MATARAM  | PADANG       | Rp9.060.000,00  | Rp4.867.000,00  |
| 247. | MATARAM  | PALEMBANG    | Rp7.551.000,00  | Rp4.246.000,00  |
| 248. | MATARAM  | PEKANBARU    | Rp9.102.000,00  | Rp4.909.000,00  |
| 249. | MATARAM  | PONTIANAK    | Rp8.001.000,00  | Rp4.706.000,00  |
| 250. | MATARAM  | SURABAYA     | Rp3.829.000,00  | Rp2.321.000,00  |
| 251. | MEDAN    | BANDA ACEH   | Rp3.466.000,00  | Rp2.193.000,00  |
| 252. | MEDAN    | MAKASSAR     | Rp12.514.000,00 | Rp6.172.000,00  |
| 253. | MEDAN    | PONTIANAK    | Rp9.733.000,00  | Rp5.230.000,00  |

|      |                |             |                 |                 |
|------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 254. | MEDAN          | SEMARANG    | Rp9.284.000,00  | Rp4.696.000,00  |
| 255. | MEDAN          | SOLO        | Rp9.284.000,00  | Rp4.835.000,00  |
| 256. | MEDAN          | SURABAYA    | Rp10.739.000,00 | Rp5.134.000,00  |
| 257. | MEDAN          | TIMIKA      | Rp18.258.000,00 | Rp9.455.000,00  |
| 258. | PADANG         | MAKASSAR    | Rp10.974.000,00 | Rp5.402.000,00  |
| 259. | PADANG         | PONTIANAK   | Rp8.193.000,00  | Rp4.460.000,00  |
| 260. | PADANG         | SEMARANG    | Rp7.744.000,00  | Rp3.925.000,00  |
| 261. | PADANG         | SOLO        | Rp7.744.000,00  | Rp4.065.000,00  |
| 262. | PADANG         | SURABAYA    | Rp9.199.000,00  | Rp4.364.000,00  |
| 263. | PADANG         | TIMIKA      | Rp16.718.000,00 | Rp8.685.000,00  |
| 264. | PALANGKARAYA   | BANDA ACEH  | Rp10.546.000,00 | Rp6.022.000,00  |
| 265. | PALANGKARAYA   | BATAM       | Rp8.161.000,00  | Rp4.578.000,00  |
| 266. | PALANGKARAYA   | YOGYAKARTA  | Rp7.477.000,00  | Rp4.022.000,00  |
| 267. | PALANGKARAYA   | MATARAM     | Rp8.557.000,00  | Rp4.888.000,00  |
| 268. | PALANGKARAYA   | MEDAN       | Rp10.300.000,00 | Rp5.412.000,00  |
| 269. | PALANGKARAYA   | PADANG      | Rp8.760.000,00  | Rp4.642.000,00  |
| 270. | PALANGKARAYA   | PALEMBANG   | Rp7.252.000,00  | Rp4.022.000,00  |
| 271. | PALANGKARAYA   | PEKANBARU   | Rp8.803.000,00  | Rp4.696.000,00  |
| 272. | PALANGKARAYA   | SEMARANG    | Rp7.252.000,00  | Rp3.947.000,00  |
| 273. | PALANGKARAYA   | SOLO        | Rp7.252.000,00  | Rp4.086.000,00  |
| 274. | PALANGKARAYA   | SURABAYA    | Rp8.696.000,00  | Rp4.385.000,00  |
| 275. | PALEMBANG      | BALIKPAPAN  | Rp9.894.000,00  | Rp5.220.000,00  |
| 276. | PALEMBANG      | MAKASSAR    | Rp9.466.000,00  | Rpa.781.000,00  |
| 277. | PALEMBANG      | PONTIANAK   | Rp6.685.000,00  | Rp3.840.000,00  |
| 278. | PALEMBANG      | SEMARANG    | Rp6.236.000,00  | Rp3.305.000,00  |
| 279. | PALEMBANG      | SOLO        | Rp6.236.000,00  | Rp3.444.000,00  |
| 280. | PALEMBANG      | SURABAYA    | Rp7.690.000,00  | Rp3.744.000,00  |
| 281. | PALEMBANG      | TIMIKA      | Rp15.210.000,00 | Rp8.076.000,00  |
| 282. | PALU           | MAKASSAR    | Rp4.268.000,00  | Rp2.578.000,00  |
| 283. | PALU           | POSO        | Rp1.957.000,00  | Rp 1.423.000,00 |
| 284. | PALU           | SORONG      | Rp6.878.000,00  | Rp3.883.000,00  |
| 285. | PALU           | SURABAYA    | Rp6.878.000,00  | Rp3.883.000,00  |
| 286. | PALU           | TOLI-TOLI   | Rp2.941.000,00  | Rp1.915.000,00  |
| 287. | PANGKAL PINANG | BALIKPAPAN  | Rp9.038.000,00  | Rp4.631.000,00  |
| 288. | PANGKAL PINANG | BANJARMASIN | Rp7.091.000,00  | Rp3.915.000,00  |
| 289. | PANGKAL PINANG | BATAM       | Rp6.739.000,00  | Rp3.818.000,00  |
| 290. | PANGKAL PINANG | YOGYAKARTA  | Rp6.065.000,00  | Rp3.262.000,00  |
| 291. | PANGKAL PINANG | MAKASSAR    | Rp9.060.000,00  | Rpa.663.000,00  |
| 292. | PANGKAL PINANG | MANADO      | Rp12.097.000,00 | Rp5.808.000,00  |
| 293. | PANGKAL PINANG | MEDAN       | Rp8.888.000,00  | Rp4.653.000,00  |
| 294. | PANGKAL PINANG | PADANG      | Rp7.337.000,00  | Rp3.883.000,00  |
| 295. | PANGKAL PINANG | PALEMBANG   | Rp5.829.000,00  | Rp3.262.000,00  |
| 296. | PANGKAL PINANG | PEKANBARU   | Rp7.391.000,00  | Rp3.936.000,00  |
| 297. | PANGKAL PINANG | PONTIANAK   | Rp6.279.000,00  | Rp3.733.000,00  |
| 298. | PANGKAL PINANG | SEMARANG    | Rp5.829.000,00  | Rp3.187.000,00  |
| 299. | PANGKAL PINANG | SOLO        | Rp5.829.000,000 | Rp3.326.000,00  |

|      |                |           |                 |                 |
|------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 300. | PANGKAL PINANG | SURABAYA  | Rp7.284.000,00  | Rp3.626.000,00  |
| 301. | PEKANBARU      | PONTIANAK | Rp8.247.000,00  | Rp4.514.000,00  |
| 302. | PEKANBARU      | SEMARANG  | Rp7.797.000,00  | Rp3.979.000,00  |
| 303. | PEKANBARU      | SOLO      | Rp7.797.000,00  | Rp4.118.000,00  |
| 304. | PEKANBARU      | SURABAYA  | Rp9.241.000,00  | Rp4.407.000,00  |
| 305. | PEKANBARU      | TIMIKA    | Rp16.771.000,00 | Rp8.739.000,00  |
| 306. | PONTIANAK      | MAKASSAR  | Rp9.915.000,00  | Rp5.241.000,00  |
| 307. | PONTIANAK      | SEMARANG  | Rp6.685.000,00  | Rp3.765.000,00  |
| 308. | PONTIANAK      | SOLO      | Rp6.685.000,00  | Rp3.904.000,00  |
| 309. | PONTIANAK      | SURABAYA  | Rp8.140.000,00  | Rp4.204.000,00  |
| 310. | PONTIANAK      | TIMIKA    | Rp15.659.000,00 | Rp8.535.000,00  |
| 311. | SEMARANG       | MAKASSAR  | Rp9.466.000,00  | Rp4.706.000,00  |
| 312. | SOLO           | MAKASSAR  | Rp9.466.000,00  | Rp4.845.000,00  |
| 313. | SURABAYA       | DENPASAR  | Rp3.198.000,00  | Rp 1.979.000,00 |
| 314. | SURABAYA       | JAYAPURA  | Rp12.675.000,00 | Rp7,231.000,00  |
| 315. | SURABAYA       | MAKASSAR  | Rp5.936.000,00  | Rp3.433.000,00  |
| 316. | SURABAYA       | TIMIKA    | Rp11.295.000,00 | Rp6.589.000,00  |

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at-cost*).

## 2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

### a. Keberangkatan

- 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat tujuan;
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

### b. Kepulangan

- 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat kedudukan asal; atau
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at-cost).

TABEL 2.3  
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO  | PROVINSI            | SATUAN     | BESARAN    |
|-----|---------------------|------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)        | (4)        |
| 1.  | ACEH                | Orang/Kali | Rp 123.000 |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | Orang/Kali | Rp 256.000 |
| 3.  | RIAU                | Orang/Kali | Rp 101.000 |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | Orang/Kali | Rp 137.000 |
| 5.  | JAMBI               | Orang/Kali | Rp 147.000 |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | Orang/Kali | Rp 190.000 |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | Orang/Kali | Rp 154.000 |
| 8.  | LAMPUNG             | Orang/Kali | Rp 167.000 |
| 9.  | BENGKULU            | Orang/Kali | Rp 109.000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | Orang/Kali | Rp 90.000  |
| 11. | BANTEN              | Orang/Kali | Rp 446.000 |
| 12. | JAWA BARAT          | Orang/Kali | Rp 166.000 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA      | Orang/Kali | Rp 256.000 |
| 14. | JAWA TENGAH         | Orang/Kali | Rp 90.000  |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | Orang/Kali | Rp 198.000 |
| 16. | JAWA TIMUR          | Orang/Kali | Rp 194.000 |
| 17. | BALI                | Orang/Kali | Rp 189.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | Orang/Kali | Rp 231.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | Orang/Kali | Rp 116.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | Orang/Kali | Rp 142.000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | Orang/Kali | Rp 134.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | Orang/Kali | Rp 150.000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | Orang/Kali | Rp 533.000 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | Orang/Kali | Rp 218.000 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | Orang/Kali | Rp 138.000 |
| 26. | GORONTALO           | Orang/Kali | Rp 240.000 |
| 27. | SULAWESI BARAT      | Orang/Kali | Rp 313.000 |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | Orang/Kali | Rp 166.000 |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | Orang/Kali | Rp 165.000 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | Orang/Kali | Rp 171.000 |
| 31. | MALUKU              | Orang/Kali | Rp 240.000 |
| 32. | MALUKU UTARA        | Orang/Kali | Rp 215.000 |
| 33. | PAPUA               | Orang/Kali | Rp 431.000 |
| 34. | PAPUA BARAT         | Orang/Kali | Rp 196.000 |

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. keberangkatan
  - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
  - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ketempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
  - 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at-cost.
- b. Kepulangan
  - 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at-cost;
  - 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
  - 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. Keberangkatan
  - 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
  - 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ketempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.
- b. Kepulangan
  - 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
  - 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
  - 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ketempat kedudukan (kantor).



2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ketempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu kota Provinsi ke Kabupaten Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4

Tabel 2.4

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN      |
|-----|------------------|------------------------|------------|--------------|
| (1) | (2)              | (3)                    | (4)        | (5)          |
|     | ACEH             |                        |            |              |
| 1.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Barat        | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 2.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Barat Daya   | Orang/Kali | Rp298.000,00 |
| 3.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Besar        | Orang/Kali | Rp183.000,00 |
| 4.  | Banda Aceh       | Kab. AcehJaya          | Orang/Kali | Rp238.000,00 |
| 5.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Selatan      | Orang/Kali | Rp325.000,00 |
| 6.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Singkil      | Orang/Kali | Rp420.000,00 |
| 7.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Tamiang      | Orang/Kali | Rp315.000,00 |
| 8.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Tengah       | Orang/Kali | Rp293.000,00 |
| 9.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Tenggara     | Orang/Kali | Rp460.000,00 |
| 10. | Banda Aceh       | Kab. Aceh Timur        | Orang/Kali | Rp289.000,00 |
| 11. | Banda Aceh       | Kab. Aceh Utara        | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 12. | Banda Aceh       | Kab. Bener Meriah      | Orang/Kali | Rp278.000,00 |
| 13. | Banda Aceh       | Kab. Bireuen           | Orang/Kali | Rp220.000,00 |
| 14. | Banda Aceh       | Kab. Gayo Lues         | Orang/Kali | Rp370.000,00 |
| 15. | Banda Aceh       | Kab. Nagan Raya        | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 16. | Banda Aceh       | Kab. Pidie             | Orang/Kali | Rp190.000,00 |
| 17. | Banda Aceh       | Kab. Pidie Jaya        | Orang/Kali | Rp205.000,00 |
| 18. | Banda Aceh       | Kota Langsa            | Orang/Kali | Rp301.000,00 |
| 19. | Banda Aceh       | Kota Lhokseumawe       | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 20. | Banda Aceh       | Kota Subulussalam      | Orang/Kali | Rp400.000,00 |

| SUMATERA UTARA |                |                              |            |               |
|----------------|----------------|------------------------------|------------|---------------|
| 21.            | Medan          | Kab. Asahan                  | Orang/Kali | Rp259.000,00  |
| 22.            | Medan          | Kab. Batubara                | Orang/Kali | Rp2 25.000,00 |
| 23.            | Medan          | Kab. Dairi                   | Orang/Kali | Rp270.000,00  |
| 24.            | Medan          | Kab. Deli Serdang            | Orang/Kali | Rp186.000,00  |
| 25.            | Medan          | Kab. Humbang<br>Hasundutan   | Orang/Kali | Rp300.000,00  |
| 26.            | Medan          | Kab. Karo                    | Orang/Kali | Rp200.000,00  |
| 27.            | Medan          | Kab. Labuhan Batu            | Orang/Kali | Rp287.000,00  |
| 28.            | Medan          | Kab. Labuhan Batu<br>Selatan | Orang/Kali | Rp360.000,00  |
| 29.            | Medan          | Kab. Labuhan Batu Utara      | Orang/Kali | Rp300.000,00  |
| 30.            | Medan          | Kab. Langkat                 | Orang/Kali | Rp186.000,00  |
| 31.            | Medan          | Kab. Mandailing Natal        | Orang/Kali | Rp420.000,00  |
| 32.            | Medari         | Kab. Padang Lawas            | Orang/Kali | Rp420.000,00  |
| 33.            | Medari         | Kab. Padang Lawas Utara      | Orang/Kali | Rp420.000,00  |
| 34.            | Medan          | Kab. Pakpak Bharat           | Orang/Kali | Rp300.000,00  |
| 35.            | Medan          | Kab. Samosir                 | Orang/Kali | Rp330.000,00  |
| 36.            | Medan          | Kab. Serdang Bedagai         | Orang/Kali | Rp200.000,00  |
| 37.            | Medan          | Kab. Simalungun              | Orang/Kali | Rp264.000,00  |
| 38.            | Medan          | Kab. Tapanuli Selatan        | Orang/Kali | Rp328.000,00  |
| 39.            | Medan          | Kab. Tapanuli Tengah         | Orang/Kali | Rp345.000,00  |
| 40.            | Medan          | Kab. Tapanuli Utara          | Orang/Kali | Rp330.000,00  |
| 41.            | Medan          | Kab. Toba                    | Orang/Kali | Rp300.000,00  |
| 42.            | Medan          | Kota Binjai                  | Orang/Kali | Rp180.000,00  |
| 43.            | Medan          | Kota Pematang Siantar        | Orang/Kali | Rp225. 000,00 |
| 44.            | Medan          | Kota Sibolga                 | Orang/Kali | Rp345.000,00  |
| 45.            | Medan          | Kota Tanjung Balai           | Orang/Kali | Rp285.000,00  |
| 46.            | Medan          | Kota Tebing Tinggi           | Orang/Kali | Rp203.000,00  |
| RIAU           |                |                              |            |               |
| 47.            | Pekanbaru      | Kab. Indragiri Hilir         | Orang/Kali | Rp380.000,00  |
| 48.            | Pekanbaru      | Kab. Indragiri Hulu          | Orang/Kali | Rp315.000,00  |
| 49.            | Pekanbaru      | Kab. Kampar                  | Orang/Kali | Rp200.000,00  |
| 50.            | Pekanbaru      | Kab. Kuantan Singingi        | Orang/Kali | Rp300.000,00  |
| 51.            | Pekanbaru      | Kab. Pelalawan               | Orang/Kali | Rp225.000,00  |
| 52.            | Pekanbaru      | Kab. Rokan Hilir             | Orang/Kali | Rp330.000,00  |
| 53.            | Pekanbaru      | Kab. Rokan Hulu              | Orang/Kali | Rp322.000,00  |
| 54.            | Pekanbaru      | Kab. Siak                    | Orang/Kali | Rp350.000,00  |
| 55.            | Pekanbaru      | Kota Dumai                   | Orang/Kali | Rp400.000,00  |
| KEPULAUAN RIAU |                |                              |            |               |
| 56.            | Tanjung Pinang | Kab. Bintan                  | Orang/Kali | RP185.000,00  |
|                | JAMBI          |                              | Orang/Kali |               |
| 57.            | Jambi          | Kab. Batanghari              | Orang/Kali | Rj 175.000,00 |
| 58.            | Jambi          | Kab. Btingo                  | Orang/Kali | Rp270.000,00  |

|                  |           |                                |            |              |
|------------------|-----------|--------------------------------|------------|--------------|
| 59.              | Jambi     | Kab. Kerinci                   | Orang/Kali | Rp325.000,00 |
| 60.              | Jambi     | Kab. Merangin                  | Orang/Kali | Rp260.000,00 |
| 61.              | Jambi     | Kab. Muaro Jambi               | Orang/Kali | RP170000,00  |
| 62.              | Jambi     | Kab. Sarolangun                | Orang/Kali | Rp241.000,00 |
| 63.              | Jambi     | Kab. Tanjung Jabung Barat      | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 64.              | Jambi     | Kab. Tanjung Jabung Timur      | Orang/Kali | RP190.000,00 |
| 65.              | Jambi     | Kab. Tebo                      | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 66.              | Jambi     | Kota SungaiPenuh               | Orang/Kali | Rp308.000,00 |
| SUMATERA BARAT   |           |                                |            |              |
| 67.              | Padang    | Kab. Agam                      | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 68.              | Padang    | Kab. Dharmasraya               | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 69.              | Padang    | Kab. Lima Puluh Kota           | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 70.              | Padang    | Kab. Padang Pariaman           | Orang/Kali | Rp205.000,00 |
| 71.              | Padang    | Kab. Pasaman                   | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 72.              | Padang    | Kab. Pasaman Barat             | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 73.              | Padang    | Kab. Pesisir Selatan           | Orang/Kali | Rp205.000,00 |
| 74.              | Padang    | Kab. Sijunjung                 | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 75.              | Padang    | Kab. Solok                     | Orang/Kali | Rp210.000,00 |
| 76.              | Padang    | Kab. Solok Selatan             | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 77.              | Padang    | Kab. Tanah Datar               | Orang/Kali | Rp220.000,00 |
| 78.              | Padang    | Kota Bukit Tinggi              | Orang/Kali | Rp215.000,00 |
| 79.              | Padang    | Kota Padang Panjang            | Orang/Kali | Rp210.000,00 |
| 80.              | Padang    | Kota Pariaman                  | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 81.              | Padang    | Kota Payakumbuh                | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 82.              | Padang    | Kota Sawahlunto                | Orang/Kali | Rp215.000,00 |
| 83.              | Padang    | Kota Solok                     | Orang/Kali | Rp210.000,00 |
| SUMATERA SELATAN |           |                                |            |              |
| 84.              | Palembang | Kab Banyuasin                  | Orang/Kali | Rp203.000,00 |
| 85.              | Palembang | Kab. Empat Lawang              | Orang/Kali | Rp315.000,00 |
| 86.              | Palembang | Kab. Lahat                     | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 87.              | Palembang | Kab. Muara Enim                | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 88.              | Palembang | Kab. Musi Banyuasin            | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 89.              | Palembang | Kab. Musi Rawas                | Orang/Kali | Rp320000,00  |
| 90.              | Palembang | Kab. Musi Rawas Utara          | Orang/Kali | Rp325.000,00 |
| 91.              | Palembang | Kab. Ogan Ilir                 | Orang/Kali | Rp205.000,00 |
| 92.              | Palembang | Kab. Ogan Komering Ilir        | Orang/Kali | Rp205.000,00 |
| 93.              | Palembang | Kab. Ogan Komering Ulu         | Orang/Kali | Rp248.000,00 |
| 94.              | Palembang | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 95.              | Palembang | Kab. Ogan Komering Ulu Timur   | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 96.              | Palembang | Kab. Pali                      | Orang/Kali | Rp265.000,00 |
| 97.              | Palembang | Kota Lubuk Linggau             | Orang/Kali | Rp290.000,00 |

|                 |                |                          |            |              |
|-----------------|----------------|--------------------------|------------|--------------|
| 98.             | Palembang      | Kota Pagar Alam          | Orang/Kali | Rp280.000,00 |
| 99.             | Palembang      | Kota Prabumulih          | Orang/Kali | Rp205.000,00 |
| LAMPUNG         |                |                          |            |              |
| 100.            | Bandar Lampung | Kab. Lampung Barat       | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 101.            | Bandar Lampung | Kab. Lampung Selatan     | Orang/Kali | Rp234.000,00 |
| 102.            | Bandar Lampung | Kab. Lampung Tengah      | Orang/Kali | Rp246.000,00 |
| 103.            | Bandar Lampung | Kab. Lampung Timur       | Orang/Kali | Rp246.000,00 |
| 104.            | Bandar Lampung | Kab. Lampung Utara       | Orang/Kali | Rp252.000,00 |
| 105.            | Bandar Lampung | Kab. Mesuji              | Orang/Kali | Rp276.000,00 |
| 106.            | Bandar Lampung | Kab. Pesawaran           | Orang/Kali | Rp216.000,00 |
| 107.            | Bandar Lampung | Kab. Pesisir Barat       | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 108.            | Bandar Lampung | Kab. Pringsewu           | Orang/Kali | Rp222.000,00 |
| 109.            | Bandar Lampung | Kab. Tanggamus           | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 110.            | Bandar Lampung | Kab. Tulang Bawang       | Orang/Kali | Rp252.000,00 |
| 111.            | Bandar Lampung | Kab. Tulang Bawang Barat | Orang/Kali | Rp267.000,00 |
| 112.            | Bandar Lampung | Kab. Way Kanan           | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 113.            | Bandar Lampung | Kota Metro               | Orang/Kali | Rp234.000,00 |
| BENGKULU        |                |                          |            |              |
| 114.            | Bengkulu       | Kab. Bengkulu Selatan    | Orang/Kali | Rp344.000,00 |
| 115.            | Bengkulu       | Kab. Bengkulu Tengah     | Orang/Kali | Rp232.000,00 |
| 116.            | Bengkulu       | Kab. Bengkulu Utara      | Orang/Kali | Rp313.000,00 |
| 117.            | Bengkulu       | Kab. Kaur                | Orang/Kali | Rp385.000,00 |
| 118.            | Bengkulu       | Kab. Kepahiang           | Orang/Kali | Rp298.000,00 |
| 119.            | Bengkulu       | Kab. Lebong              | Orang/Kali | Rp375.000,00 |
| 120.            | Bengkulu       | Kab. Mukomuko            | Orang/Kali | Rp423.000,00 |
| 121.            | Bengkulu       | Kab. Rejang Lebong       | Orang/Kali | Rp313.000,00 |
| 122.            | Bengkulu       | Kab. Seluma              | Orang/Kali | Rp282.000,00 |
| BANGKA BELITUNG |                |                          |            |              |
| 123.            | Pangkalpinang  | Kab. Bangka              | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 124.            | Pangkalpinang  | Kab. Bangka Barat        | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 125.            | Pangkalpinang  | Kab. Bangka Selatan      | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 126.            | Pangkalpinang  | Kab. Bangka Tengah       | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| BANTEN          |                |                          |            |              |
| 127.            | Serang         | Kab. Lebak               | Orang/Kali | Rp208.000,00 |
| 128.            | Serang         | Kab. Pandeglang          | Orang/Kali | Rp138.000,00 |
| 129.            | Serang         | Kab. Serang              | Orang/Kali | Rp160.000,00 |
| 130.            | Serang         | Kab. Tangerang           | Orang/Kali | Rp254.000,00 |
| 131.            | Serang         | Kota Cilegon             | Orang/Kali | Rp160.000,00 |
| 132.            | Serang         | Kota Tangerang           | Orang/Kali | Rp313.000,00 |
| 133.            | Serang         | Kota Tangerang Selatan   | Orang/Kali | Rp347.000,00 |
| JAWA BARAT      |                |                          |            |              |
| 134.            | Bandung        | Kab. Bandung             | Orang/Kali | Rp183.000,00 |
| 135.            | Bandung        | Kab. Bandung Barat       | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 136.            | Bandung        | Kab. Bekasi              | Orang/Kali | Rp265.000,00 |

|      |             |                   |            |              |
|------|-------------|-------------------|------------|--------------|
| 137. | Bandung     | Kab. Bogor        | Orang/Kali | Rp185.000,00 |
| 138. | Bandung     | Kab. Ciamis       | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 139. | Bandung     | Kab. Cianjur      | Orang/Kali | Rp215.000,00 |
| 140. | Bandung     | Kab. Cirebon      | Orang/Kali | Rp280.000,00 |
| 141. | Bandung     | Kab. Garut        | Orang/Kali | Rp243.000,00 |
| 142. | Bandung     | Kab. Indramayu    | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 143. | Bandung     | Kab. Karawang     | Orang/Kali | Rp248.000,00 |
| 144. | Bandung     | Kab. Kuningan     | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 145. | Bandung     | Kab. Majalengka   | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 146. | Bandung     | Kab. Pangadaran   | Orang/Kali | Rp283.000,00 |
| 147. | Bandung     | Kab. Purwakarta   | Orang/Kali | Rp218.000,00 |
| 148. | Bandung     | Kab. Subang       | Orang/Kali | Rp208.000,00 |
| 149. | Bandung     | Kab. Sukabumi     | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 150. | Bandung     | Kab. Sumedang     | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 151. | Bandung     | Kab. Tasikmalaya  | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 152. | Bandung     | Kota Banjar       | Orang/Kali | Rp283.000,00 |
| 153. | Bandung     | Kota Bekasi       | Orang/Kali | Rp265.000,00 |
| 154. | Bandung     | Kota Bogor        | Orang/Kali | Rp285.000,00 |
| 155. | Bandung     | Kota Cimahi       | Orang/Kali | Rp168.000,00 |
| 156. | Bandung     | Kota Cirebon      | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 157. | Bandung     | Kota Depok        | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 158. | Bandung     | Kota Sukabumi     | Orang/Kali | Rp226.000,00 |
| 159. | Bandung     | Kota Tasikmalaya  | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
|      | JAWA TENGAH |                   |            |              |
| 160. | Semarang    | Kab. Banjarnegara | Orang/Kali | Rp260.000,00 |
| 161. | Semarang    | Kab. Banyumas     | Orang/Kali | Rp257.000,00 |
| 162. | Semarang    | Kab. Batang       | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 163. | Semarang    | Kab. Blora        | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 164. | Semarang    | Kab. Boyolali     | Orang/Kali | Rp240000,00  |
| 165. | Semarang    | Kab. Brebes       | Orang/Kali | Rp263000,00  |
| 166. | Semarang    | Kab. Cilacap      | Orang/Kali | Rp280.000,00 |
| 167. | Semarang    | Kab. Demak        | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 168. | Semarang    | Kab. Grobogan     | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 169. | Semarang    | Kab. Jepara       | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 170. | Semarang    | Kab. Karanganyar  | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 171. | Semarang    | Kab. Kebumen      | Orang/Kali | Rp260.000,00 |
| 172. | Semarang    | Kab. Kendal       | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 173. | Semarang    | Kab. Klaten       | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 174. | Semarang    | Kab. Kudus        | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 175. | Semarang    | Kab. Magelang     | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 176. | Semarang    | Kab. Pati         | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 177. | Semarang    | Kab. Pekalongan   | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 178. | Semarang    | Kab. Pemalang     | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 179. | Semarang    | Kab. Purbalingga  | Orang/Kali | Rp270.000,00 |

|                 |            |                   |            |              |
|-----------------|------------|-------------------|------------|--------------|
| 180.            | Semarang   | Kab. Purworejo    | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 181.            | Semarang   | Kab. Rembang      | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 182.            | Semarang   | Kab. Semarang     | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 183.            | Semarang   | Kab. Sragen       | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 184.            | Semarang   | Kab. Sukoharjo    | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 185.            | Semarang   | Kab. Tegal        | Orang/Kali | Rp260.000,00 |
| 186.            | Semarang   | Kab. Temanggung   | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 187.            | Semarang   | Kab. Wonogiri     | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 188.            | Semarang   | Kab. Wonosobo     | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 189.            | Semarang   | Kota Magelang     | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 190.            | Semarang   | Kota Pekalongan   | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 191.            | Semarang   | Kota Salatiga     | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 192.            | Semarang   | Kota Surakarta    | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 193.            | Semarang   | Kota Tegal        | Orang/Kali | Rp260.000,00 |
| D.I. YOGYAKARTA |            |                   |            |              |
| 194.            | Yogyakarta | Kab. Bantul       | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 195.            | Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 196.            | Yogyakarta | Kab. Kulon Progo  | Orang/Kali | RP350.000,00 |
| 197.            | Yogyakarta | Kab. Sleman       | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| JAWA TIMUR      |            |                   |            |              |
| 198.            | Surabaya   | Kab. Bangkalan    | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 199.            | Surabaya   | Kab. Banyuwangi   | Orang/Kali | Rp285.000,00 |
| 200.            | Surabaya   | Kab. Blitar       | Orang/Kali | Rp255.000,00 |
| 201.            | Surabaya   | Kab. Bojonegoro   | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 202.            | Surabaya   | Kab. Bondowoso    | Orang/Kali | Rp255.000,00 |
| 203.            | Surabaya   | Kab. Gresik       | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 204.            | Surabaya   | Kab. Jember       | Orang/Kali | Rp261.000,00 |
| 205.            | Surabaya   | Kab. Jombang      | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 206.            | Surabaya   | Kab. Kediri       | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 207.            | Surabaya   | Kab. Lamongan     | Orang/Kali | Rp225000,00  |
| 208.            | Surabaya   | Kab. Lumajang     | Orang/Kali | Rp261.000,00 |
| 209.            | Surabaya   | Kab. Madiun       | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 210.            | Surabaya   | Kab. Magetan      | Orang/Kali | Rp253.000,00 |
| 211.            | Surabaya   | Kab. Malang       | Orang/Kali | Rp228.000,00 |
| 212.            | Surabaya   | Kab. Mojokerto    | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 213.            | Surabaya   | Kab. Nganjuk      | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 214.            | Surabaya   | Kab. Ngawi        | Orang/Kali | Rp253.000,00 |
| 215.            | Surabaya   | Kab. Pacitan      | Orang/Kali | Rp285000,00  |
| 216.            | Surabaya   | Kab. Pamekasan    | Orang/Kali | Rp243.000,00 |
| 217.            | Surabaya   | Kab. Pasuruan     | Orang/Kali | Rp228.000,00 |
| 218.            | Surabaya   | Kab. Ponorogo     | Orang/Kali | Rp255.000,00 |
| 219.            | Surabaya   | Kab. Probolinggo  | Orang/Kali | Rp228.000,00 |
| 220.            | Surabaya   | Kab. Sampang      | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 221.            | Surabaya   | Kab. Sidoarjo     | Orang/Kali | Rp240.000,00 |

|                     |           |                          |            |              |
|---------------------|-----------|--------------------------|------------|--------------|
| 222.                | Surabaya  | Kab. Situbondo           | Orang/Kali | Rp255.000,00 |
| 223.                | Surabaya  | Kab. Sumenep             | Orang/Kali | Rp255.000,00 |
| 224.                | Surabaya  | Kab. Trenggalek          | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 225.                | Surabaya  | Kab. Tuban               | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 226.                | Surabaya  | Kab. Tulungagung         | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 227.                | Surabaya  | Kota Batu                | Orang/Kali | Rp242.000,00 |
| 228.                | Surabaya  | Kota Blitar              | Orang/Kali | Rp255.000,00 |
| 229.                | Surabaya  | Kota Bojonegoro          | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 230.                | Surabaya  | Kota Kediri              | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 231.                | Surabaya  | Kota Madiun              | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 232.                | Surabaya  | Kota Malang              | Orang/Kali | Rp228.000,00 |
| 233.                | Surabaya  | Kota Mojokerto           | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 234.                | Surabaya  | Kota Probolinggo         | Orang/Kali | Rp228.000,00 |
| BALI                |           |                          |            |              |
| 235.                | Denpasar  | Kab. Badung              | Orang/Kali | Rp188.000,00 |
| 236.                | Denpasar  | Kab. Bangli              | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 237.                | Denpasar  | Kab. Buleleng            | Orang/Kali | Rp265.000,00 |
| 238.                | Denpasar  | Kab. Gianyar             | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 239.                | Denpasar  | Kab. Jembrana            | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 240.                | Denpasar  | Kab. Karangasem          | Orang/Kali | Rp263.000,00 |
| 241.                | Denpasar  | Kab. Tabanan             | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| NUSA TENGGARA BARAT |           |                          |            |              |
| 242.                | Mataram   | Kab Lombok Barat         | Orang/Kali | Rp325.000,00 |
| 243.                | Mataram   | Kab. Lombok Tengah       | Orang/Kali | Rp450.000,00 |
| 244.                | Mataram   | Kab. Lombok Timur        | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| NUSA TENGGARA TIMUR |           |                          |            |              |
| 245.                | Kupang    | Kab. Belu                | Orang/Kali | Rp325.000,00 |
| 246.                | Kupang    | Kab Kupang               | Orang/Kali | Rp175.000,00 |
| 247.                | Kupang    | Kab Timor Tengah Selatan | Orang/Kali | Rp218.000,00 |
| 248.                | Kupang    | Kab Timor Tengah Utara   | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| KALIMANTAN BARAT    |           |                          |            |              |
| 249.                | Pontianak | Kab. Bengkayang          | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 250.                | Pontianak | Kab. Kapuas Hulu         | Orang/Kali | Rp550.000,00 |
| 251.                | Pontianak | Kab. Kayong Utara        | Orang/Kali | Rp550.000,00 |
| 252.                | Pontianak | Kab. Ketapang            | Orang/Kali | Rp550.000,00 |
| 253.                | Pontianak | Kab. Kubu Raya           | Orang/Kali | Rp185.000,00 |
| 254.                | Pontianak | Kab. Landak              | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 255.                | Pontianak | Kab. Melawi              | Orang/Kali | Rp430.000,00 |
| 256.                | Pontianak | Kab. Mempawah            | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 257.                | Pontianak | Kab. Sambas              | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 258.                | Pontianak | Kab. Sanggau             | Orang/Kali | Rp303.000,00 |
| 259.                | Pontianak | Kab. Sekadau             | Orang/Kali | Rp343.000,00 |
| 260.                | Pontianak | Kab. Sintang             | Orang/Kali | Rp392000,00  |
| 261.                | Pontianak | Kota Singkawang          | Orang/Kali | Rp257.000,00 |

| KALIMANTAN TENGAH  |              |                                |            |                 |
|--------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------------|
| 262.               | Palangkaraya | Kab Barito Selatan             | Orang/Kali | Rp290.000,00    |
| 263.               | Palangkaraya | Kab Barito Timur               | Orang/Kali | Rp333.000,00    |
| 264.               | Palangkaraya | Kab Barito Utara               | Orang/Kali | Rp425.000,00    |
| 263.               | PalangRaraya | Kab Gunung Mas                 | Orang/Kali | RP300.000,00    |
| 266.               | PalangRaraya | Kab. Kapuas                    | Orang/Kali | Rp275.000,00    |
| 267.               | Palangkaraya | Kab. Katingan                  | Orang/Kali | Rp250.000,00    |
| 268.               | Palangkaraya | Kab. Kotawaringin Barat        | Orang/Kali | Rp425.000,00    |
| 269.               | Palangkaraya | Kab. Kotawaringin Timur        | Orang/Kali | Rp300.000,00    |
| 270.               | Palangkaraya | Kab. Lamandau                  | Orang/Kali | Rp525.000,00    |
| 271.               | Palangkaraya | Kab. Murung Raya               | Orang/Kali | Rp448.000,00    |
| 272.               | Palangkaraya | Kab. Pulau Pisau               | Orang/Kali | Rp250.000,00    |
| 273.               | Palangkaraya | Kab. Seruyan                   | Orang/Kali | Rp328.000,00    |
| 274.               | Pnangkaraya  | Kab. Sukamara                  | Orang/Kali | Rp525.000,00    |
| KALIMANTAN SELATAN |              |                                |            |                 |
| 275.               | Banjarmasin  | Kab. Balangan                  | Orang/Kali | Rp230 000,00    |
| 276.               | Banjarmasin  | Kab. Banjar                    | Orang/Kali | Rp170.000,00    |
| 277.               | Banjarmasin  | Kab. Barito Kuala              | Orang/Kali | Rp200.000,00    |
| 278.               | Banjarmasin  | Kab. Hulu Sungai Selatan       | Orang/Kali | Rp200.000,00    |
| 279.               | Banjarmasin  | Kab. Hulu Sungai Tengah        | Orang/Kali | Rp212.000,00    |
| 280.               | Banjarmasin  | Kab. Hulu Sungai Utara         | Orang/Kali | Rp218.000,00    |
| 281.               | Banjarmasin  | Kab. Kota Baru                 | Orang/Kali | Rp290.000,00    |
| 282.               | Banjarmasin  | Kab. Tabalong                  | Orang/Kali | Rp234.000,00    |
| 283.               | Banjarmasin  | Kab. Tanah Bumbu               | Orang/Kali | Rp300.000,00    |
| 284.               | Banjarmasin  | Kab. Tanah Laut                | Orang/Kali | RP200.000,00    |
| 285.               | Banjarmasin  | Kab. Tapin                     | Orang/Kali | Rp189.000,00    |
| 286.               | Banjarmasin  | Kota Banjarbaru                | Orang/Kali | Rp225.000,00    |
| KALIMANTAN TIMUR   |              |                                |            |                 |
| 287.               | Samarinda    | Kab. Kutai Barat               | Orang/Kali | Rp1.500.000,00  |
| 288                | Samarinda    | Kab. Kutai Kartanegara         | Orang/Kali | Rp500.000,00    |
| 289.               | Samarinda    | Kab. Kutai Timur               | Orang/Kali | Rp1.350.000,00  |
| 290                | Samarinda    | Kab. Paser                     | Orang/Kali | Rp 1.650.000,00 |
| 291.               | Samarinda    | Kab. Penajam Paser Utara       | Orang/Kali | RP650.000,00    |
| 292                | Samañnda     | Kota Balikpapan                | Orang/Kali | RP550.000,00    |
| 293                | Samannnda    | Kota Bontang                   | Orang/Kali | Rp600.000,00    |
| SULAWESI UTARA     |              |                                |            |                 |
| 294.               | Manado       | Kab. Bolaang Mongondow         | Orang/Kali | Rp250.000,00    |
| 295.               | Manado       | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | Orang/Kali | Rp275.000,00    |
| 296.               | Manado       | Kab. Bolaang Mongondow Timur   | Orang/Kali | Rp250.000,00    |
| 297.               | Manado       | Kab. Bolaang Mongondow Utara   | Orang/Kali | Rp300.000,00    |
| 298.               | Manado       | Kab. Minahasa                  | Orang/Kali | Rp180.000,00    |
| 299.               | Manado       | Kab. Minahasa Selatan          | Orang/Kali | Rp180.000,00    |



|                  |           |                        |            |              |
|------------------|-----------|------------------------|------------|--------------|
| 300.             | Manado    | Kab. Minahasa Tenggara | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 301.             | Manado    | Kab. Minahasa Utara    | Orang/Kali | Rp175.000,00 |
| 302.             | Manado    | Kota Bitung            | Orang/Kali | RP175.000,00 |
| 303.             | Manado    | Kota Kotamobagu        | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 304.             | Manado    | Kota Tomohon           | Orang/Kali | Rp170.000,00 |
| GORONTALO        |           |                        |            |              |
| 305.             | Gorontalo | Kab. Boalemo           | Orang/Kali | Rp400.000,00 |
| 306.             | Gorontalo | Kab. Gorontalo         | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 307.             | Gorontalo | Kab. Gorontalo Utara   | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 308.             | Gorontalo | Kab. Pahuwato          | Orang/Kali | Rp650.000,00 |
| SULAWESI BARAT   |           |                        |            |              |
| 309.             | Mamuju    | Kab. Maene             | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 310.             | Mamuju    | Kab. Mamasa            | Orang/Kali | Rp359.000,00 |
| 311.             | Mamuju    | Kab. Mamiiju Tengah    | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 312.             | Mamuju    | Kab. Pasangkayu        | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 313.             | Mamuju    | Kab. Polewali Mandar   | Orang/Kali | Rp260.000,00 |
| SULAWESI SELATAN |           |                        |            |              |
| 314.             | Makassar  | Kab. Bantaeng          | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 315.             | Makassar  | Kab. Barru             | Orang/Kali | Rp210.000,00 |
| 316.             | Makassar  | Kab. Bone              | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 317.             | Makassar  | Kab. Bulukumba         | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 318.             | Makassar  | Kab. Enrekang          | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 319.             | Makassar  | Kab. Gowa              | Orang/Kali | Rp175.000,00 |
| 320.             | Makassar  | Kab. Jeneponto         | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 321.             | Makassar  | Kab. Luwu              | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 322.             | Makassar  | Kab. Luwu Timur        | Orang/Kali | Rp375.000,00 |
| 323.             | Makassar  | Kab. Luwu Utara        | Orang/Kali | Rp365.000,00 |
| 324.             | Makassar  | Kab. Maros             | Orang/Kali | Rp170.000,00 |
| 325.             | Makassar  | Kab. Pinrang           | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 326.             | Makassar  | Kab. Sidenreng Rappang | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 327.             | Makassar  | Kab. Sinjai            | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 328.             | Makassar  | Kab. Soppeng           | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 329.             | Makassar  | Kab. Takalar           | Orang/Kali | Rp190.000,00 |
| 330.             | Makassar  | Kab. Tanatoraja        | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 331.             | Makassar  | Kab. Toraja Utara      | Orang/Kali | RP350000,00  |
| 332.             | Makassar  | Kab. Wajo              | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 333.             | Makassar  | Kota Palopo            | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 334.             | Makassar  | Kota Pare-Pare         | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| SULAWESI TENGAH  |           |                        |            |              |
| 335.             | Palu      | Kab. Luwuk             | Orang/Kali | Rp400.000,00 |
| 336.             | Palu      | Kab. Buol              | Orang/Kali | Rp472.000,00 |
| 337.             | Palu      | Kab. Donggala          | Orang/Kali | Rp130.000,00 |
| 338.             | Palu      | Kab. Morowali          | Orang/Kali | Rp400.000,00 |
| 339.             | Palu      | Kab. Morowali Utara    | Orang/Kali | Rp400.000,00 |

|                   |           |                       |            |                |
|-------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------|
| 340.              | Palu      | Kab. Parigi Moutong   | Orang/Kali | Rp250.000,00   |
| 341.              | Palu      | Kab. Poso             | Orang/Kali | Rp280.000,00   |
| 342.              | Palu      | Kab. Sigi             | Orang/Kali | Rp219.000,00   |
| 343.              | Palu      | Kab. Tojouna-Una      | Orang/Kali | Rp350.000,00   |
| 344.              | Palu      | Kab. Toli-Toli        | Orang/Kali | Rp412.000,00   |
| SULAWESI TENGGARA |           |                       |            |                |
| 345.              | Kendari   | Kab. Bombana          | Orang/Kali | Rp355.000,00   |
| 346.              | Kendari   | Kab. Kolaka           | Orang/Kali | Rp370.000,00   |
| 347.              | Kendari   | Kab. Kolaka Timur     | Orang/Kali | Rp300.000,00   |
| 348.              | Kendari   | Kab. Kolaka Utara     | Orang/Kali | Rp425.000,00   |
| 349.              | Kendari   | Kab. Konawe           | Orang/Kali | Rp300.000,00   |
| 350.              | Kendari   | Kab. Konawe Selatan   | Orang/Kali | Rp305.000,00   |
| 351.              | Kendari   | Kab. Konawe Utara     | Orang/Kali | RP300.000,00   |
| MALUKU UTARA      |           |                       |            |                |
| 352.              | Sofifi    | Kab. Halmahera Barat  | Orang/Kali | Rp850.000,00   |
| 353.              | Sofifi    | Kab. Halmahera Tengah | Orang/Kali | Rp1.000.000,00 |
| 354.              | SoFtfi    | Kab. Halmahera Timur  | Orang/Kali | Rp1.250.000,00 |
| 355.              | Sofifi    | Kab. Halmahera Utara  | Orang/Kali | Rp900.000,00   |
| PAPUA             |           |                       |            |                |
| 356.              | Jayapura  | Kab. Jayapura         | Orang/Kali | Rp600.000,00   |
| 357.              | Jayapura  | Kab. Keerom           | Orang/Kali | Rp900.000,00   |
| 358.              | Jayapura  | Kab. Sarmi            | Orang/Kali | Rp2.700.000,00 |
| 359.              | Jayapura  | Kab. Merauke          | Orang/Kali | Rp1.134.000,00 |
| PAPUA BARAT       |           |                       |            |                |
| 360.              | Manokwari | Kab Teluk Bintuni     | Orang/Kali | Rp900.000,00   |
| 361.              | Manokwari | Kab Manokwari Selatan | Orang/Kali | Rp750. 000,00  |
| 362.              | Manokwari | Kab. Pegunungan Arfak | Orang/Kali | Rp2.650.000,00 |
| 363.              | Manokwari | Kota Sorong           | Orang/Kali | Rp1.000.000,00 |

#### 2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONEWAY*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ketempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One-Trip) terinci pada Tabel 2.5

TABEL 2.5  
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE  
KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

| NO  | IBUKOTA<br>PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA<br>TUJUAN | SATUAN     | BESARAN        |
|-----|---------------------|---------------------------|------------|----------------|
| (1) | (2)                 | (3)                       | (4)        | (5)            |
| 1.  | Jakarta             | Kota Bekasi               | Orang/Kali | Rp 284.000,00  |
| 2.  | Jakarta             | Kab. Bekasi               | Orang/Kali | Rp 284.000,00  |
| 3   | Jakarta             | Kab. Bogor                | Orang/Kali | Rp 300.000,00  |
| 4.  | Jakarta             | Kota Bogor                | Orang/Kali | Rp 275 .000,00 |
| 5   | Jakarta             | Kota Depok                | Orang/Kali | Rp286.000,00   |
| 6.  | Jakarta             | Kota Tangerang            | Orang/Kali | Rp286.000,00   |
| 7.  | Jakarta             | Kota Tangerang<br>Selatan | Orang/Kali | Rp275.000,00   |
| 8.  | Jakarta             | Kab. Tangerang            | Orang/Kali | Rp310.000,00   |
| 9.  | Jakarta             | Kepulauan Seribu          | Orang/Kali | Rp428.000,00   |

### 3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerjalainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, Lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6  
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

| No. | JENIS RAPAT   | Satuan     | Makan      | KUDAPAN (SNACK) |
|-----|---|------------|------------|-----------------|
| 1   | 2   | 3          | 4          | 5               |
| 1   | Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I /Setara | Orang/Kali | Rp 110.000 | Rp 49.000       |
| 2   | Rapat Biasa   | Orang/Kali | Rp 44.000  | Rp 16.000       |

#### 4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

##### 4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin Gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (duapersen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7  
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

| No. | JENIS GEDUNG                    | Satuan                | Besaran (Rp) |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1   | 2                               | 3                     | 4            |
| 1   | Gedung Bertingkat               | M <sup>2</sup> /Tahun | 191.000      |
| 2   | Gedung Tidak Bertingkat         | M <sup>2</sup> /Tahun | 128.000      |
| 3   | Halaman Gedung/ Bangunan Kantor | M <sup>2</sup> /Tahun | 10.000       |

#### 4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi :

1. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, dan Tabel 2.10.

TABEL 2.8  
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

| No. | Jenis Kendaraan          | Satuan     | Besaran (Rp) |
|-----|--------------------------|------------|--------------|
| 1   | 2                        | 3          | 4            |
| 1   | Kepala Daerah/Ketua DPRD | Unit/Tahun | 41.900.000   |
| 2   | Anggota DPRD             | Unit/Tahun | 41.000.000   |
| 3   | Pejabat Eselon II        | Unit/Tahun | 38.580.000   |

TABEL 2.9

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

| No. | Jenis Kendaraan | Satuan     | Besaran (Rp) |
|-----|-----------------|------------|--------------|
| 1   | 2               | 3          | 4            |
| 1   | Roda Empat      | Unit/Tahun | 33.600.000   |
| 2   | Doubel Gardan   | Unit/Tahun | 36.230.000   |
| 3   | Roda Dua        | Unit/Tahun | 3.680.000    |

TABEL 2.10

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL  
DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN *SPEED BOAT*

| No. | Uraian                              | Satuan     | Besaran (Rp) |
|-----|-------------------------------------|------------|--------------|
| 1   | 2                                   | 3          | 4            |
| 1   | Operasional dalam Lingkungan Kantor | Unit/Tahun | 9.750.000    |
| 2   | Roda 6                              | Unit/Tahun | 37.110.000   |
| 3   | <i>Speed Boat</i>                   | Unit/Tahun | 20.240.000   |

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.11

TABEL 2.11  
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

| NO  | URAIAN                       | SATUAN        | BESARAN (Rp) |
|-----|------------------------------|---------------|--------------|
| (1) | (2)                          | (3)           | (4)          |
| 1.  | Inventaris Kantor            | Pegawai/Tahun | 80.000       |
| 2.  | Personal Computer/ Notebook  | Unit/Tahun    | 730.000      |
| 3.  | Printer                      | Unit/Tahun    | 690.000      |
| 4.  | AC Split                     | Unit/Tahun    | 610.000      |
| 5.  | Genset lebihkecildari 50 KVA | Unit/Tahun    | 7.190.000    |
| 6.  | Genset 75 KVA                | Unit/Tahun    | 8.640.000    |
| 7.  | Genset 100 KVA               | Unit/Tahun    | 10.150.000   |
| 8.  | Genset 125 KVA               | Unit/Tahun    | 10.780.000   |
| 9.  | Genset 150 KVA               | Unit/Tahun    | 13.260.000   |
| 10. | Genset 175 KVA               | Unit/Tahun    | 14.810.000   |
| 11. | Genset 200 KVA               | Unit/Tahun    | 15.850.000   |
| 12. | Genset 250 KVA               | Unit/Tahun    | 16.790.000   |
| 13. | Genset 275 KVA               | Unit/Tahun    | 17.760.000   |
| 14. | Genset 300 KVA               | Unit/Tahun    | 20.960.000   |
| 15. | Genset 350 KVA               | Unit/Tahun    | 22.960.000   |
| 16. | Genset 450 KVA               | Unit/Tahun    | 25.620.000   |
| 17. | Genset 500 KVA               | Unit/Tahun    | 31.770.000   |

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

a.n. WALIKOTA BENGKULU  
WAKIL WALIKOTA  
Cap/dto  
DEDY WAHYUDI